

TESIS

**PENGARUH PANGKALAN UTAMA ANGKATAN LAUT VI
TERHADAP MORFOLOGI PERMUKIMAN TABARINGAN MAKASSAR**

***THE EFFECT OF THE MAIN NAVAL BASE VI
ON THE MORPHOLOGY OF THE TABARINGAN SETTLEMENT IN
MAKASSAR***

**ANDI NUR MUSBAWATI
D042192001
BEASISWA PENDIDIKAN IPTEK S-2 PROGRAM REGULER
TNI ANGKATAN LAUT**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

**PENGARUH PANGKALAN UTAMA ANGGKATAN LAUT VI
TERHADAP MORFOLOGI PERMUKIMAN TABARINGAN MAKASSAR**

Tesis
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi
Teknik Arsitektur



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

TESIS

PENGARUH PANGKALAN UTAMA ANGKATAN LAUT VI TERHADAP MORFOLOGI PERMUKIMAN TABARINGAN MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh

ANDI NUR MUSBAWATI
D042192001

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin pada tanggal 10 Juni 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Ketua,



Afifah Harisah, ST., MT., Ph. D
NIP. 19700804 199702 2 001

Sekretaris,



Dr. Ir. Mohammad Mochsen Sir, ST., MT
NIP. 19690407 199603 1 003

Ketua Program Studi
Magister Teknik Arsitektur,



Dr. Eng. Ir. Asniawaty, ST., MT
NIP. 19710925 199903 2 001

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Eng. Ir. Muhammad Isran Ramli, ST., MT
NIP. 19730926 200012 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Nur Musbawati

Nomor Mahasiswa : D042192001

Program Studi : Teknik Arsitektur

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Juni 2022

Yang menyatakan,



ANDI NUR MUSBAWATI

ABSTRAK

ANDI NUR MUSBAWATI. Pengaruh Pangkalan Utama Angkatan Laut VI terhadap Morfologi Permukiman Tabaringan Makassar (dibimbing oleh Ibu Afifah Harisah, ST., MT., Ph. D dan Bapak Dr. Ir. Mohammad Mochsen Sir, ST., MT)

Pangkalan Utama Angkatan Laut VI (Lantamal VI Makassar) sebagai salah satu Pangkalan Angkatan Laut yang terletak di Makassar Sulawesi Selatan memegang peranan penting dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pengembangan morfologi permukiman di sekitar Lantamal VI Makassar. Sampel penelitian yang dipilih adalah Lantamal VI Makassar yang keberadaannya bersinggungan langsung dengan tiga kelurahan yaitu kelurahan Tamalabba, kelurahan Tabaringan, dan kelurahan Totaka. Paradigma penelitian menggunakan rasionalistik kualitatif. Metode penelitian yaitu dengan melaksanakan survei lapangan dan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam ke tokoh masyarakat, observasi dengan melaksanakan dokumentasi di lapangan, pengambilan data berupa peta di Kantor BPN, BPS, Museum Kota, Dinas Fasilitas Pangkalan, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan yang mendasar atau fenomenal pada penelitian ini terjadi pada tahun 1995-1998 ketika jalan tol dibangun kemudian terjadi pemekaran pada permukiman Tabaringan, perubahan bangunan dengan bentuk dan pola ruang, ruko dan hunian/rumah tinggal.

Kata kunci: Pengaruh, Pangkalan Utama Angkatan Laut VI, Morfologi Permukiman

ABSTRACT

ANDI NUR MUSBAWATI. The Effect of the Main Naval Base VI on the Morphology of the Tabaringan Settlement In Makassar (Supervised by Afifah Harisah, ST., MT., Ph. D and Dr. Ir. Mohammad Mochsen Sir, ST., MT)

As one of the Naval Bases in Makassar, South Sulawesi, Main Naval Base VI (Lantamal VI Makassar) plays an important role in sustaining Indonesian sovereignty and expanding the morphology of settlements around Lantamal VI Makassar. Lantamal VI Makassar was chosen as the research sample because of its proximity to three urban villages, namely Tamalabba Village, Tabaringan Village, and Totaka Village. The research paradigm was a qualitative rationalism. The research method used were field surveys, while the data collection techniques used were in-depth interviews with community leaders, observation by carrying out documentation in the field, collecting data in the form of maps at the National Land Agency, Statistics Indonesia, City Museum, Naval Base Facilities Service, Sub-District and Urban Village Office. The results showed that the fundamental or phenomenal changes to this research occurred in 1995-1998 when the toll road was built then occurred sensitization to Tabilang settlement, change of buildings with the shape and pattern of space, esidential/residential homes.

Keywords: Effect, Main Naval Base VI, Settlement Morphology

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, berkah, karunia, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun tesis ini dengan judul: Pengaruh Pangkalan Utama Angkatan Laut VI terhadap Morfologi Permukiman Tabaringan Makassar, sebagai salah satu tahapan persyaratan akademik untuk menyelesaikan studi pada Program Magister Teknik Arsitektur Universitas Hasanuddin Makassar.

Berbagai kendala dan keterbatasan yang terjadi dalam penyusunan tesis ini, namun akhirnya dapat teratasi sehingga tesis ini bisa terselesaikan dengan baik. Walaupun jauh dari kesempurnaan, namun penulis berusaha untuk menyajikan yang terbaik dalam tesis ini.

Penulisan dan penyusunan Tesis ini tidak terlepas dari dukungan dan semangat dari para pembimbing Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya Penulis sampaikan kepada Ibu Afifah Harisah, ST., MT., Ph. D selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Ir. Mohammad Mochsen Sir, ST., MT selaku Dosen Pembimbing II, atas segala perhatian dan bimbingannya dan melalui kesempatan ini pula penulis ingin menghaturkan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Ibu Ria Wikantari R, M. Arch., Ph. D selaku Dosen Penguji
2. Bapak Ir. Abdul Mufti Radja, ST., MT., Ph. D selaku Dosen Penguji
3. Bapak Dr. Ir. Edward Syarif, ST., MT. selaku Dosen Penguji
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Teknik Arsitektur Universitas Hasanuddin Makassar yang telah mendidik, membina dan

mengantarkan penulis untuk menempuh kematangan dalam berfikir dan berperilaku.

5. Markas Besar TNI Angkatan Laut dalam hal ini Dinas Pendidikan TNI Angkatan Laut yang telah memberikan beasiswa Pendidikan IPTEK S-2 program regular TNI Angkatan Laut untuk menempuh pendidikan Magister Arsitektur di Universitas Hasanuddin Makassar.
6. Ayahanda dan ibunda tercinta serta seluruh keluarga yang dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan hati memberikan bantuan moral dan spiritual yang tak ternilai harganya.
7. Suami tersayang Mayor Laut Amin Mahmud, ST dan anak-anakku Yusuf Alghifari Mahmud, Muh. Kautsar Mahmud (Alm), Syafiqah Zhafrah Mahmud, dan Mutiah Ramadhani Mahmud yang selalu memberikan semangat, motivasi, pengertian, doa serta dorongan dalam penyusunan tesis ini.
8. Bagian administrasi Pascasarjana Arsitektur Unhas, Pak Saharuddin, S. Sos (Pak Aca') dan Pak John, yang telah membantu segala proses administrasi dan memberikan motivasi dalam penyelesaian tesis ini.
9. Instansi dan lembaga yang telah membantu peneliti dalam menyediakan data-data yang dibutuhkan, diantaranya Lantamal VI Makassar, BPN, BRIN, BPS, Museum Kota, Kecamatan Ujung Tanah, Kelurahan Tamalabba, Kelurahan Tabaringan, Kelurahan Totaka, serta para responden yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancara.

10. Saudara serta rekan-rekan seangkatan 2019 (2) adek Ana, adek Hayati, adek Ayu, dan adek Kurniawan yang telah banyak memberikan masukan selama proses belajar dan semua pihak yang telah memberikan bantuannya.

Setelah melalui proses yang panjang dan penuh tantangan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang tentunya masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, walaupun demikian penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan penulis khususnya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis dan semua pihak yang membantu penulisan tesis ini.

Makassar, Juni 2022

Andi Nur Musbawati

DAFTAR ISI

TESIS	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
ABSTRAK	1
ABSTRACT	2
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	6
DAFTAR GAMBAR	9
DAFTAR TABEL	10
BAB I	11
PENDAHULUAN	11
1.1 Latar Belakang	11
1.2 Rumusan Masalah	17
1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian.....	18
1.4 Manfaat Penelitian	18
1.4.1 Manfaat Teoritis	18
1.4.2 Manfaat Praktisi	19
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	19
1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah	19
1.6 Ruang Lingkup Pembahasan	22
1.7 Penegasan Istilah	22
1.8 Sistematika Penulisan.....	25
1.8 Alur Penelitian	26
BAB II	27
KAJIAN PUSTAKA	27
2.1 Teori Morfologi	27
2.1.1 Pengertian Morfologi	27
2.1.2 Permukiman	32

2.1.3 Elemen-elemen Morfologi	37
2.1.5 Teori Pangkalan	51
2.3 Kerangka Konseptual Penelitian.....	61
2.4 Penelitian Terdahulu	62
2.5 Kebaruan Penelitian.....	66
BAB III.....	68
METODE PENELITIAN	68
3.1. Jenis Penelitian	68
3.2 Paradigma Penelitian	69
3.3 Metode Penelitian	71
3.4 Waktu dan Lokasi Penelitian	72
3.4.1 Waktu Penelitian	72
3.4.2 Lokasi Penelitian	72
3.5 Populasi dan sampel Penelitian.....	74
3.5.1 Populasi.....	74
3.5.2 Sampel	75
3.6 Jenis Data	76
3.7 Teknik Pengumpulan Data	80
3.8 Teknik Penyajian Data	84
3.9 Teknik Analisis Data.....	86
3.10 Teknik Keandalan dan Keabsahan Data	91
BAB IV	92
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	92
4.1 Lokasi Penelitian.....	92
4.1.1 Kondisi Fisik Wilayah Kecamatan Ujung Tanah	92
4.1.2. Kondisi Geografis Kecamatan Ujung Tanah.....	94
4.2 Interpretasi Data Hasil Penelitian.....	95
4.2.1 Morfologi Permukiman dikaitkan dengan Bangunan Militer.....	95

4.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Morfologi Permukiman Tabaringan Makassar.....	103
4.2.3 Pengaruh adanya pangkalan Utama Angkatan Laut VI terhadap Perubahan Morfologi Permukiman Tabaringan Makassar	111
4.2.4 Diagram Diskusi	130
BAB V	131
KESIMPULAN DAN SARAN.....	131
5.1 Kesimpulan	131
5.2 Saran.....	133
5.3 Kendala Penelitian	135
DAFTAR PUSTAKA	136
LAMPIRAN 1 WAWANCARA	139
LAMPIRAN 2 JADWAL PENELITIAN	142
LAMPIRAN 3 BIOGRAFI PENULIS.....	143

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Administrasi Kelurahan Tamalabba, Tabaringan dan Totaka	21
Gambar 2. Alur Penelitian (Peneliti, 2021)	26
Gambar 3. Kerangka Teoritik	43
Gambar 4. Kerangka Konseptual Penelitian	62
Gambar 5. Lokasi Penelitian	73
Gambar 6. Populasi bangunan Pangkalan Utama Angkatan Laut VI	74
Gambar 7. Peta Administrasi Kecamatan Ujung tanah.....	93
Gambar 8. Peta Administrasi Kelurahan Tamalabba.....	98
Gambar 9. Peta Administrasi Kelurahan Tabaringan.....	100
Gambar 10. Peta Administrasi Kelurahan Totaka	102
Gambar 11. Permukiman penduduk sebelum pembangunan jalan tol	106
Gambar 12. Kondisi setelah pembangunan jalan tol	107
Gambar 13. Pelabuhan Paotere peninggalan Kerajaan Gowa-Tallo sejak abad ke-14 110	
Gambar 14. Diagram Diskusi	130

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Elemen-elemen Morfologi.....	39
Tabel 2. Penelitian Terdahulu.....	63
Tabel 3. Perbedaan dan Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti	66
Tabel 4. Sampel Elemen-Element Morfologi	75
Tabel 5. Kebutuhan Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Penyajian Data	80
Tabel 6. Kondisi Geografis Kecamatan Ujung Tanah	94
Tabel 7. Pembangunan Jalan Tol Ujung Tanah.....	105
Tabel 8. Pola Tata Guna Lahan	112
Tabel 9. Bentuk Bangunan	114
Tabel 10. Pola Jalan	115
Tabel 11. Ruang Terbuka Hijau (RTH).....	116
Tabel 12. Fungsi Bangunan.....	117
Tabel 13. Pola Tata Guna Lahan	118
Tabel 14. Bentuk Bangunan	119
Tabel 15. Pola Jalan	121
Tabel 16. Ruang Terbuka Hijau (RTH).....	122
Tabel 17. Fungsi Bangunan.....	123
Tabel 18. Pola Tata Guna Lahan	124
Tabel 19. Bentuk Bangunan	126
Tabel 20. Pola Jalan	127
Tabel 21. Ruang Terbuka Hijau (RTH).....	128
Tabel 22. Fungsi Bangunan.....	129

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebuah pangkalan militer adalah fasilitas yang dimiliki secara langsung dan dioperasikan oleh atau untuk militer atau salah satu cabang yang menaungi peralatan militer dan personil, dan memfasilitasi pelatihan dan operasi. Pangkalan yang dimaksud dalam hal ini Pangkalan Utama Angkatan Laut VI Makassar atau Lantamal VI Makassar adalah salah satu dari beberapa Pangkalan Militer TNI Angkatan Laut di Indonesia yang Berada di Makassar, Tugas pokok Pangkalan adalah menyelenggarakan dukungan logistik dan administrasi bagi unsur-unsur TNI Angkatan Laut serta Kotama TNI lainnya dan pembinaan Potensi maritim menjadi kekuatan Pertahanan Keamanan Negara Indonesia di laut serta tugas-tugas lainnya berdasarkan kebijakan Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL).

Secara fisik unsur TNI AL di Makassar telah terbentuk sejak Tahun 1950 dan seiring dengan berjalannya waktu, maka nama organisasi, jumlah personel, fasilitas dan kemampuannya berubah menyesuaikan perkembangan organisasi TNI Angkatan Laut pada masanya dengan nama Kedinasan Kota Angkatan Laut (KKAL) Makassar (1950-1952). Meletusnya Peristiwa Andi Azis dan Pemberontakan Republik Maluku Selatan pada Tahun 1950, keamanan diwilayah Indonesia bagian Timur terganggu. Setelah pemberontakan tersebut berhasil ditumpas, pemimpin ALRI saat itu memandang perlu membentuk unsur ALRI dalam rangka memulihkan keamanan wilayah maritim Indonesia bagian Timur, maka dibentuklah

Kedinasan Kota Angkatan Laut Makassar yang disingkat KKAL Makassar berdasarkan Surat Perintah Kasal Nomor: G.1/6/9 tanggal 1 Juli 1950 dengan tugas pokok yakni mengurus kepentingan Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) di daerah ini, bekerja sama dengan instansi sipil maupun militer serta memberi bantuan logistik kapal-kapal armada yang berlabuh di pelabuhan Makassar dan yang beroperasi di wilayah Indonesia bagian Timur.

Untuk pertama kalinya, Komandan Kedinasan Kota Angkatan Laut (KKAL) dijabat oleh Kapten Laut Soekoyo dengan kegiatan masih sangat terbatas karena kurangnya personel dan fasilitas. Tempat penampungan anggotanya adalah bangunan Bara-Baraya (sempat menjadi Fakultas Ekonomi Unhas, saat ini menjadi Gedung Serbaguna Unhas di Jl. Sunu).

Jabatan Komandan kembali dipercayakan kepada Kapten Laut Soekoyo dan dalam rangka mengamankan kota Makassar diikutsertakan anggota Korps Komando Angkatan Laut (KKO AL) untuk membantu patroli Komando Militer Kota Makassar dengan Komandan Peleton yang pertama adalah Letnan Koesnaniwoto. Berdasarkan Skep Kasal Nomor: A.17/I/9 tanggal 25 September 1953, Komalko M.M. berubah nama menjadi Komando Daerah Maritim Makassar (KDMM). Tanggal 2 Oktober 1953, Mayor Laut R.E. Martadinata atas nama KSAL melantik Mayor Laut A.F. Langkay menjadi Komandan Komando Daerah Maritim Makassar.

Tugas pokok Komando Daerah Maritim Makassar adalah mengawasi daerah laut serta memelihara ketertiban dan keamanan diperairan Kalimantan Selatan mulai dari Sungai Sampit Kalimantan Timur sampai Kalimantan Inggris dan perairan Pulau Sulawesi, membina administrasi dan ketertiban anggota Angkatan Laut yang berkedudukan diwilayah Komando Daerah Maritim Makassar serta memegang Komando Operasi atas Satuan Angkatan Laut yang berkedudukan dibawahnya.

Pada periode ini, Komando Daerah Militer Makassar (KKDM) berkembang dengan pesat, baik jumlah personel, material dan fasilitas dengan melaksanakan pembangunan-pembangunan:

- a. Pembangunan Kompleks Maciniayu.
- b. Pembangunan Kompleks Layang dan Markas KDMM.
- c. Pembangunan Stasion Angkatan Laut Manado dan Stasion Angkatan Laut Makassar sebagai hasil penukaran dengan Ksatrian Angkatan Laut Malino.
- d. Pembangunan Stasion Angkatan Laut Banjarmasin pada tanggal 20 Juli 1960.

Meletusnya peristiwa Andi Aziz dan Pemberontakan Maluku Selatan pada tahun 1950, Kemudian wilayah Timur terganggu. Setelah pemberontakan tersebut berhasil ditumpas, pemimpin Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) saat itu memandang perlu membentuk unsur Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) dalam rangka memulihkan keamanan wilayah maritim Indonesia bagian Timur, maka dibentuklah kedinasan Kota Angkatan Laut Makassar yang disingkat KKAL Makassar

berdasarkan Surat Perintah Kasal Nomor: G.1/6/9 tanggal 1 Juli 1950 dengan tugas pokok: Mengurus kepentingan Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) di daerah ini, bekerja sama dengan instansi sipil maupun militer dan memberi bantuan logistik kapal-kapal Armada yang berlabuh di Pelabuhan Makassar yang beroperasi di wilayah Indonesia Bagian Timur.

Pada tanggal 26 Mei 1960 dibentuk Badan Pengurus PERTIP (Persatuan Tionghoa Peranakan) yang menjabat sebagai Ketua adalah Thio Heng Soe dengan dibantu tiga wakil Ketua (Wakil Ketua III adalah Huang Sung Chie, Badan Pengurus tersebut terdiri dari tiga seksi, yaitu ekonomi, social, propaganda atau politik yang sangat menonjol pada Kecamatan Ujung Tanah. Ujung Tanah adalah sebuah kecamatan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang dari segi wilayah hukum pelabuhan Paotere dilengkapi kepolisian kawasan sektor pelabuhan Paotere namun wilayah hukumnya hanya didalam area pelabuhan saja, terpisah dari kepolisian Ujung tanah dan disinilah terdapat Pelabuhan Paotere.

Kecamatan Ujung Tanah inilah terdapat 3 Kelurahan yang diambil sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa kelurahan tersebut bersinggungan langsung bahkan didalamnya terdapat Pangkalan Utama Angkatan Laut VI yaitu Kelurahan Tamalaba, Kelurahan Tabaringan dan Kelurahan Totaka. Kelurahan Totaka ini sebelumnya adalah Kelurahan Tabaringan namun pada tahun 1996-1998 terjadi pemekaran sehingga keberadaannya terpisahkan dengan adanya pembangunan jalan tol sehingga untuk Kelurahan Tabaringan sendiri terletak di Jl. Cakalang.

Adapun jumlah desa/kelurahan ada 9 (sembilan) dengan Luas 594 Ha (5,94 Km²) dan jumlah penduduk 47,695 jiwa (BPS, 2020).

Permukiman Tabaringan adalah nama tempat di Makassar, yang pada saat itu banyak dihuni orang Tionghoa Makassar sehingga menjelaskan keberadaan perkumpulan-perkumpulan yang berdasarkan tempat tinggal, yang mana pada waktu itu perkumpulan dengan tujuan ekonomi atau perdagangan yang sangat menonjol dengan jumlah mencapai 200 toko besar, yang terutama milik kaum totok. Sementara itu warung kecil mencapai 1.000 warung kecil yang dimiliki Pedagang Totok asal Fujian dengan mendirikan sebuah perkumpulan baru bernama warung Kong Hwee atau Zhonghua atau perkumpulan pedagang eceran Tionghoa. Pangkalan Militer Angkatan Laut VI atau Lantamal VI Makassar dan permukiman Tabaringan disekitarnya dapat ditempuh dalam waktu 4 (empat) menit atau 950 meter.

Pemilihan lokasi di wilayah Pangkalan Utama Angkatan Laut VI adalah bukan untuk kondisi saat ini saja akan tetapi juga harus mempertimbangkan faktor sustainabilitas lokasi akibat perubahan dinamika sistem, sehingga model sistem dinamik perlu dikembangkan dalam permasalahan ini. Sistem dinamik adalah suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan, memodelkan, dan mensimulasikan suatu sistem yang dinamis dari waktu ke waktu terus berubah (J.W Forrester 1994).

Keberadaan Pangkalan Militer di suatu wilayah sangat penting dilaksanakan sebagai bentuk perwujudan kerjasama pertahanan yang dilakukan antar negara ataupun organisasi nasional maupun internasional. Permasalahan yang kerap timbul adalah tentang penegakkan yurisdiksi kepada personel militer yang bertugas di pangkalan militer tersebut. Penempatan personel yang bertugas seharusnya ditempatkan maksimal agar tugas-tugas di Pangkalan Militer dapat berjalan dengan lancar dan keamanan dapat terselenggara dengan baik.

Penelitian sebelumnya dari Bondan Haryono (2009) menemukan bahwa pola persebaran pangkalan dan Kapal Angkatan Laut (KAL) memiliki kaitan yang tinggi terhadap tingkat pelanggaran hukum, atau jumlah pangkalan dan Kapal Angkatan Laut (KAL) yang tinggi terbukti dapat menekan tingkat pelanggaran hukum. Tetapi pola persebaran pangkalan dan Kapal Angkatan Laut (KAL) memiliki kaitan yang rendah terhadap tingkat pelanggaran kedaulatan, atau jumlah pangkalan dan Kapal Angkatan Laut (KAL) yang tinggi tidak dapat mengurangi pelanggaran kedaulatan, pelanggaran kedaulatan lebih cenderung dipengaruhi faktor geografis dan politik.

Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, mengamanatkan "Postur TNI dibangun dan dipersiapkan sebagai bagian dari postur pertahanan negara untuk mengatasi setiap ancaman militer dan ancaman bersenjata.". Namun dalam kegiatan strategis ini dapat mempengaruhi morfologi pemukiman di sekitar Pangkalan Utama Angkatan Laut.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam latar belakang diatas, telah dijelaskan bahwa Pangkalan Utama Angkatan Laut VI (Lantamal VI Makassar) berada didalamnya dan bersinggungan langsung dengan 3 (tiga) Kelurahan sebagai berikut:

- Kelurahan Tamalabba, mempunyai 4 (empat) Rukun Warga yang mana 1 (satu) Rukun Warganya adalah rumah dinas Angkatan Laut (binaan Angkatan Laut).
- Kelurahan Tabaringan, mempunyai 25 (dua puluh lima) Rukun Warga. Namun pada tahun 1996 mengalami pemekaran menjadi kelurahan Totaka.
- Kelurahan Totaka, mempunyai 4 (empat) Rukun Warga, 2 (dua) disebelah kanan jalan toll dan 2 (dua) disebelah kiri jalan toll yang didominasi adalah rumah dinas Angkatan Laut (binaan Angkatan Laut).

Secara umum, hal-hal yang menjadi dasar penulis ingin mengkaji lebih dalam dan elemen-elemen morfologi permukiman apa yang mempengaruhi perkembangan permukiman disekitar Pangkalan Utama Angkatan Laut VI, maka dapat di identifikasikan masalah yaitu:

1. Bagaimana morfologi permukiman Tabaringan dan sekitar dikaitkan dengan bangunan militer?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi morfologi permukiman Tabaringan Makassar?
3. Bagaimana pengaruh adanya Pangkalan Utama Angkatan Laut VI terhadap perubahan morfologi permukiman Tabaringan Makassar?

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan adanya pengaruh terhadap morfologi permukiman Tabaringan Makassar dan elemen- elemen yang membentuk morfologi permukiman. Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan beberapa sasaran yang terdiri dari:

1. Mengungkapkan morfologi permukiman Tabaringan dan sekitar dikaitkan dengan bangunan militer.
2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi morfologi permukiman Tabaringan Makassar.
3. Mengungkapkan pengaruh adanya Pangkalan Utama Angkatan Laut VI terhadap perubahan morfologi pemukiman Tabaringan Makassar.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan setelah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan ilmu arsitektur dan bidang ilmu lainnya yang terkait.
2. Memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu arsitektur.
3. Sebagai bahan untuk pengembangan arsitektur ke depan.

1.4.2 Manfaat Praktisi

1. Bagi ilmu arsitektur memberikan informasi tentang pengaruh Pangkalan Utama Angkatan Laut VI terhadap morfologi permukiman Tabaringan Makassar.
2. Bagi peneliti, sebagai bahan referensi peneliti terkait dengan Pangkalan Utama Angkatan Laut VI dan pengaruhnya terhadap morfologi permukiman Tabaringan Makassar.
3. Bagi Pemerintah setempat, sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi pemerintah Kota Makassar khususnya permukiman Tabaringan Makassar.
4. Bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya, keberadaan Pangkalan Utama Angkatan Laut atau Lantamal VI Makassar ini dapat memberikan rasa aman dan nyaman selain itu bisa menjadi salah satu tempat alternatif wisata karena dalam basis Pangkalan Utama ini terdapat museum, pantai Jalaria, kolam renang dan sebagainya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

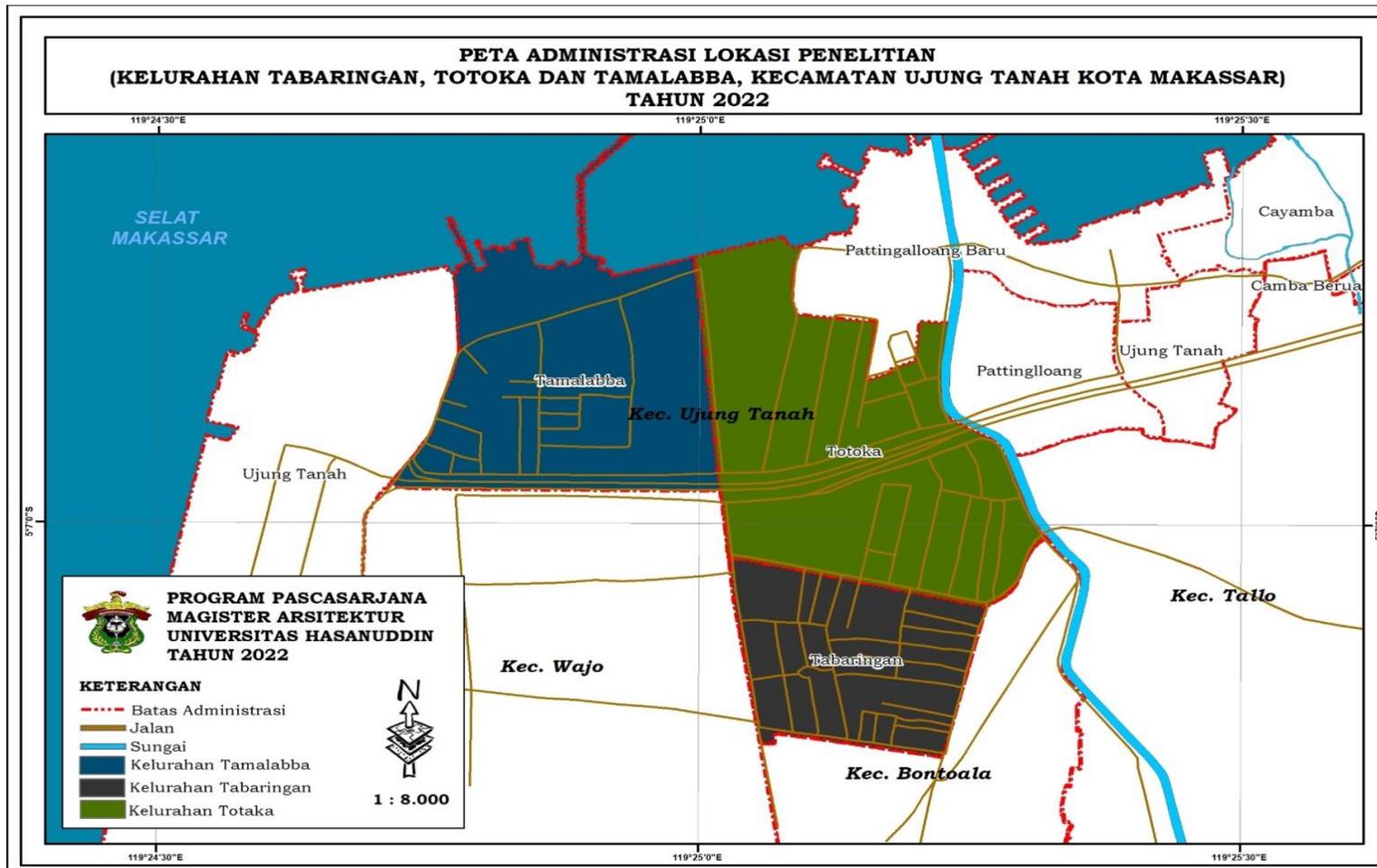
1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah

Pangkalan Utama Angkatan Laut VI dengan 3 (tiga) Kelurahan didalamnya yang dijadikan sebagai lokasi penelitian berada di Kecamatan Ujung Tanah Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak pada titik koordinat 5°8'6" LS dan 119°24'17'38 LB. Pada tahun 1996 Kecamatan Ujung Tanah mengalami pemekaran sebanyak 4 (empat) Kelurahan Ujung Tanah menjadi Tamalabba, Kelurahan Tabaringan menjadi Kelurahan Totaka,

Kelurahan Cambayya menjadi Kelurahan Camba Berua dan Kelurahan Pattingalloang lama menjadi Pattingalloang baru.

Dalam penelitian ini, wilayah studi dibatasi hanya pada Pangkalan Utama Angkatan Laut VI termasuk 3 (tiga) Kelurahan yang bersinggungan langsung. Adapun batasan lokasi yang diteliti adalah:

- Sebelah Utara : Laut Makassar
- Sebelah Selatan : Kelurahan Kelurahan Parang layang Kecamatan Tallo
- Sebelah Barat : Kelurahan Ujung Tanah
- Sebelah Timur : Kelurahan Pattingalloang lama



Gambar 1. Peta Administrasi Kelurahan Tamalabba, Tabaringan dan Totoka

1.6 Ruang Lingkup Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada pengaruh Pangkalan Utama Angkatan Laut VI yang didasarkan pada faktor-faktor dan elemen-elemen morfologi disekitarnya. Lingkup pembahasan dalam penelitian ini meliputi terkait sejarah perkembangan Pangkalan Utama Angkatan laut VI dan kelurahan disekitarnya, morfologi permukiman dan pengaruhnya sekaligus kaitannya dengan bangunan militer.

1.7 Penegasan Istilah

Penegasan istilah atau defenisi konseptual berfungsi untuk memberikan dan memperjelas makna yang penting dalam penelitian ini secara konseptual atau sesuai kamus agar tidak salah menafsirkan permasalahan yang sedang diteliti. Beberapa istilah yang penting yang harus disepakati berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti antara lain:

- **Pengaruh**: Menurut KBBI daring; (n) *daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.*
- **Pangkalan**: Menurut KBBI daring; (n) 1. tempat kapal, perahu berlabuh; tepi laut (atau tepi sungai) tempat berlabuh; 2. Tempat menibun (mengumpulkan) barang-barang dagangan, hasil bumi, dan sebagainya;3. Tempat (pelabuhan, lapangan terbang, dan sebagainya) yang dijadikan tumpuan untuk menyerang musuh; 4 tempat tertentu untuk berkedai, perhentian taksi;5 tuan atau nyonya rumah (penerima tamu).

- **Militer** : Menurut KBBI daring; (n) 1. *tentara; anggota tentara; 2. Ketentaraan.*
- **Pangkalan Utama:** Fasilitas yang dimiliki secara langsung dan dioperasikan oleh atau untuk militer atau salah satu cabang yang menaungi peralatan militer dan personil, dan memfasilitasi pelatihan dan operasi. Dalam pengertian judul kata Pangkalan Utama dalam hal ini Angkatan Laut Lantamal VI Makassar memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan administrasi dan logistik bagi unsur-unsur TNI AL (Kapal, Pesud dan Marinir) dan melaksanakan pembinaan potensi maritim dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki pangkalan sendiri maupun yang terkait di Makassar.
- **Angkatan Laut:** Angkatan bersenjata dengan alat perlengkapannya yang bertugas dibidang pertahanan dan keamanan terutama di laut.
- **Morfologi** : Menurut KBBI daring; (n) 1. Ling cabang linguistic tentang morfem dan kombinasinya; 2. Bio ilmu pengetahuan tentang bentuk luar dan susunan makhluk hidup; 3. Geo struktur luar dr batu-batuan dalam hubungan dengan perkembangan ciri topografis.
- **Permukiman:** Menurut KBBI daring; (n) 1. Bagian permukaan bumi dalam kaitannya dengan keadaan alam dan sebagainya yang khusus; 2. Lingkungan pemerintah; wilayah; 3. Selingkungan tempat yang dipakai untuk tujuan khusus; 4. kawasan: industri (perkantoran dan sebagainya); 5. Tempat dalam satu lingkungan yang sama keadaannya (iklimnya, hasilnya, dan sebagainya).

Lebih jauh lagi permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di Kawasan perkotaan atau Kawasan perdesaan.

- **Kecamatan:** Menurut KBBI daring; arti kata kecamatan adalah daerah bagian kabupaten (kota) yang membawahkan beberapa desa atau kelurahan, dikepalai oleh seorang camat. Arti lainnya dari kecamatan adalah bagian pemerintahan daerah yang dikepalai seorang camat.
- **Ujung Tanah:** Sebuah kecamatan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
- **Kelurahan:** Menurut KBBI daring; (n) 1. Daerah pemerintahan yang paling bawah yang dipimpin oleh seorang lurah; 2. Kantor (rumah) lurah.
- **Tamalabba:** Tamalabba (Tamalabba adalah kelurahan di Kecamatan Ujung Tanah, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, Wikipedia).
- **Tabaringan:** Tabaringan (Tabaringan adalah kelurahan di Kecamatan Ujung Tanah, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, Wikipedia).
- **Totaka:** Totaka (Totaka adalah kelurahan di Kecamatan Ujung Tanah, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, Wikipedia).
- **Makassar:** Makassar (Makassar: kadang di eja Macassar, Mangkasar; dari 1971 hingga 1999 secara resmi dikenal sebagai Ujung Pandang) adalah sebuah kotamadya dan sekaligus ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kotamadya ini adalah kota terbesar pada 5°8'S 119°25" E Koordinat: 5°8'S 119°25" E, di pesisir barat daya pulau Sulawesi, berhadapan dengan selat Makassar (<https://sulselprov.go.id/> diakses tanggal 9 Juni 2021).

1.8 Sistematika Penulisan

Secara garis besar pembahasan pada penelitian ini terbagi dalam beberapa bagian, antara lain:

BAB I: Pendahuluan; Menguraikan Latar Belakang; Rumusan Masalah; Tujuan dan Sasaran Penelitian; Manfaat Penelitian; Ruang Lingkup Penelitian; Penegasan Istilah; dan Alur Penelitian.

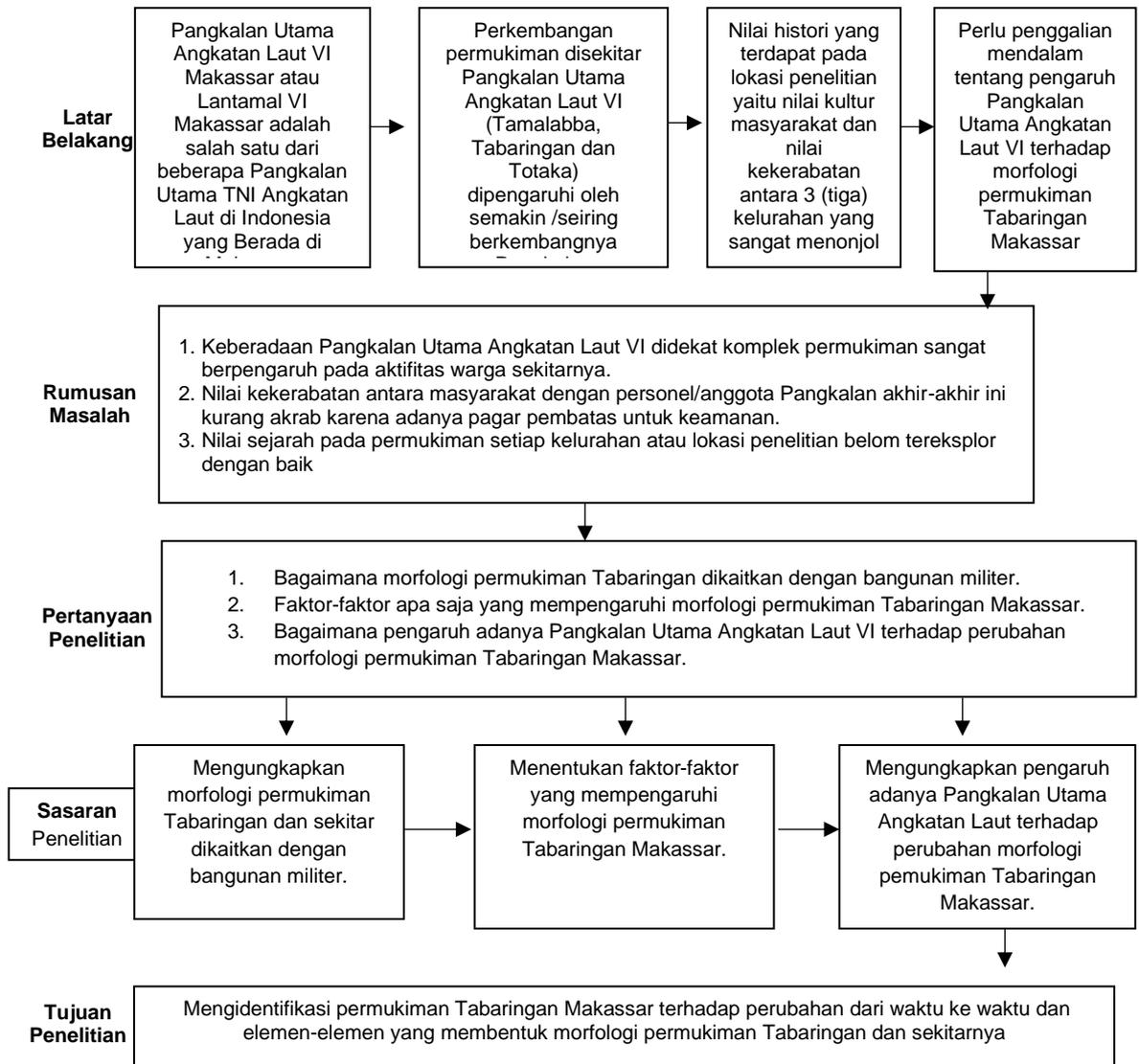
BAB II: Kajian Pustaka; Menguraikan Teori Morfologi; Pengertian Morfologi; Pengertian Pangkalan Militer; Kerangka Teoritik; Faktor-faktor Pendorong Morfologi Permukiman; Pengertian Pangkalan Angkatan Laut; Standar Bangunan Militer; Motto *Jalasveva Jayamahe*; Kerangka Konseptual penelitian; Penelitian Terdahulu; Kebaruan Penelitian.

BAB III: Metode Penelitian; Menguraikan Jenis Penelitian; Paradigma Penelitian; Metode Penelitian; Waktu dan Lokasi Penelitian; Populasi dan Sampel Penelitian; Jenis Data; Teknik Pengumpulan Data; Teknik Penyajian Data; Teknik Analisa Data; Teknik Keandalan dan Keabsahan Data.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan; Menjelaskan Lokasi Penelitian; Interpretasi Data Hasil Penelitian; Keandalan dan Keabsahan Penelitian; Temuan Penelitian.

BAB V: Penutup; Merupakan Kesimpulan; Saran; Kendala Penelitian.

1.8 Alur Penelitian



Gambar 2. Alur Penelitian (Peneliti, 2021)

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Morfologi

2.1.1 Pengertian Morfologi

Morfologi kota didefinisikan oleh Zahnd (2006) merupakan penataan/formasi keadaan kota yang sebagai objek dan sistem dapat diselidiki secara struktural, fungsional dan visual. Sedangkan arti kata morfologi sendiri adalah penataan/formasi sebuah objek atau sistem. Morfologi perkotaan menurut Yunus (2004) dianggap sebagai studi tentang bentuk fisik kota, jaringan perkotaan yang terdiri dari pola jalan, bentuk dan ukuran bangunan, arsitektur, serta pola-pola permukiman. Smiles (dalam Yunus, 2004) mengungkapkan dalam morfologi kota terdapat beberapa unsur, antara lain:

- *Land use* (unsur-unsur penggunaan lahan) Elemen ini bersifat temporer, dapat dijadikan dasar untuk membangun kembali dan merencanakan fungsi baru dari suatu bangunan yang akan dibuat, yaitu dengan cara menggabungkan atau mengurangi lot bangunan serta mengubah pola jalan.
- *Street plan* (pola-pola jalan) Pola jaringan jalan terbentuk melalui suatu proses yang panjang dan merupakan bagian atau kelanjutan dari pola yang ada sebelumnya.
- *Architectural style of building and their design* (tipe-tipe bangunan) Massa bangunan memiliki peran yang kuat dalam membentuk struktur kawasan dan jaringan jalan. Perkembangan bangunan dapat mencapai

titik jenuh dengan area terbangun yang meliputi seluruh luasan kapling. Setelah itu akan terjadi proses intervensi luasan kapling dan bangunan berupa penambahan, pengurangan, atau pembentukan bangunan dan kavling baru.

Pada pendekatan morfologi kota, metode analisis tersebut digunakan untuk mengeksplorasi bentuk perkotaan, formasi dan transformasi serta klasifikasi ruang perkotaan dengan analogi dan homologi. Melalui pendekatan morfologi perkotaan, dapat diperoleh pemahaman mengenai pola perkotaan dan karakteristiknya yang menciptakan *sense of place*. Sehingga membantu dalam mengetahui proses perubahan yang terbentuk pada sebuah tempat.

Morfologi terdiri dari dua suku kata yaitu *Morpho* yang berarti bentuk dan *Logos* yang berarti ilmu. Secara sederhana morfologi sebagai sebuah objek bentuk dalam skala lebih luas contoh skala kota dan kawasan. Secara umum, resolusi pengamatan dalam analisis morfologi antara lain terdiri dari Plot skala pengamatan morfologi dengan resolusi yang paling rendah karena hanya fokus ke komponen-komponen fisik yang berada pada potongan lahan yang sama, Distrik merupakan sekumpulan plot beserta komponen fisik didalamnya yang dihubungkan oleh ruas-ruas jalan, kota sangat kompleksitas struktur dan pola ruang dan wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur. (PP 47, thn 1997).

Morfologi lebih menekankan pada pembahasan bentuk geometrik, sehingga dapat memberi makna pada ungkapan ruangnya dikaitkan dengan nilai ruang tertentu. Nilai ruang berkaitan erat dengan organisasi, hubungan dan bentuk ruang. Hierarki ruang disebabkan karena adanya nilai perbedaan bentuk ruang yang menunjukkan adanya derajat kepentingan baik secara fungsional, formal maupun simbolik. Sistem tata nilai tercipta karena ukuran, bentuk yang unik dan lokasi (Putra, 2006).

Morfologi merupakan artikulasi formal untuk membentuk karakter arsitektur, dan dapat dibaca melalui pola, hierarki, dan hubungan ruang. Morfologi lebih menekankan pada pembahasan bentuk geometrik, sehingga dapat memberi makna pada ungkapan ruangnya dikaitkan dengan nilai ruang tertentu. Nilai ruang berkaitan erat dengan organisasi, hubungan dan bentuk ruang. Hierarki ruang disebabkan karena adanya nilai perbedaan bentuk ruang yang menunjukkan adanya derajat kepentingan, baik secara fungsional, formal, maupun simbolik. Sistem tata nilai tercipta karena ukuran, bentuk unik dan lokasi (Budi Arlius Putra, 2006;17)

Morfologi pada kota menggambarkan perubahan pada keterbentukan kota. Perubahan tersebut dapat ditinjau dari berbagai aspek di antaranya terlihat pada pola ruang, bentuk arsitektur, maupun elemen pembentuk karakter sebuah kota. Selain itu, turut dikaji pula mengenai hal yang menjadi implikasi dari suatu perubahan kota tersenut, diantaranya aktivitas masyarakat yang mencakup aktivitas sosial, budaya, dan ekonomi (Aldiansyah dan Nareswari, 2019).

Zhand dalam penelitian Edward Syarif (2016) menjelaskan bahwa produk morfologi merupakan hal yang dihasilkan melalui suatu proses. Morfologi sebagai suatu proses menekankan pada mengapa elemen-elemen morfologi dibentuk, untuk apa, bagaimana dibentuk dan bagaimana cara perkembangannya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut melibatkan banyak faktor dan hanya dapat ditemukan pada saat memperhatikan lingkup proses yang berlangsung didalam pembangunan dan pengelolaan kota.

Morfologi sendiri berasal dari kata morf yang berarti bentuk, sehingga morfologi juga diartikan sebagai bentuk kenampakan fisik kawasan (James & Bound, 2009). Seiring berkembangnya waktu memunculkan perubahan social, perubahan tersebut terwujud dalam bentuk fisik kawasan. Produk perubahan sosial dalam fisik kawasan dikenal dengan morfologi. Morfologi merupakan kenampakan fisik kawasan yang ditinjau dari struktur yang membentuk bentuk kenampakan tertentu. Kenampakan fisik morfologi bukan hanya bentuk melainkan adanya hubungan antar kawasan (Dahal, Benner, & Lindquist, 2017).

Menurut Herbert dalam Yunus (2002) matra morfologi pemukiman menyoroti eksistensi ruang kota yang dapat diamati dari penampakan kota secara visual yang antara lain tercermin pada sistem jalan yang ada, blok-blok bangunan baik dari daerah hunian perdagangan, industri dan juga bangunan individual. Struktur fisik suatu lingkungan maupun bangunan suatu kawasan melalui tipomorfologi dapat ditinjau dari beberapa teori seperti tinjauan mengenai citra kota, Lynch (1959): Path, Edge, District,

Node, dan Landmark. Elemen kawasan (district) dijelaskan dalam beberapa elemen yang membentuk sebuah kota yakni tata guna lahan, bentuk dan kelompok bangunan, ruang terbuka, parkir dan sirkulasi, pedestrian, penanda, pendukung aktifitas, dan preservasi (Hamka, 2017).

Kemudian melihat pandangan Carmona et.al. (2003), kajian morfologi adalah kajian mengenai bentuk dan proses terbentuknya suatu permukiman, dimana kajian tersebut menekankan pada analisa evolusi perubahan dari permukiman lama menjadi permukiman baru.

Kesimpulan yang dapat diambil dari sumber-sumber diatas, morfologi ruang adalah kajian dan penelusuran mengenai proses perkembangan serta perubahan bentuk suatu ruang yang sangat erat kaitannya dengan artefak-artefak yang ada dilokasi tersebut.

Morfologi memiliki tiga komponen dalam mencermati kondisi fisik kawasan. Komponen tersebut ditinjau dari:

1. Penggunaan lahan kawasan yang mencerminkan aktivitas kawasan.
2. Pola sirkulasi atau pola jaringan jalan yang menghubungkan antar kawasan.
3. Pola bangunan beserta fungsinya (Soetomo, 2009)

Komponen morfologi secara struktural dibedakan menjadi jaringan jalan, kapling, dan bangunan. Ketiganya memiliki hubungan atau keterkaitan satu dengan yang lain (Tallo, Pratiwi, & Astutik, 2014). Bentuk morfologi dibedakan menjadi bentuk kompak dan bentuk tidak kompak. Bentuk kompak meliputi bentuk bujur sangkar, empat persegi panjang, bulat, kipas, pita, dan gurita. Bentuk tidak kompak meliputi bentuk terpecah,

berantai, terbelah dan stellar (Yunus, 2005). Bangunan merupakan salah satu komponen morfologi, ada 3 pola hubungan yaitu pola homogen, heterogen, dan menyebar (Zahnd, 2008).

Morfologi Permukiman adalah suatu pola kawasan yang mempergunakan lahan kawasan sebagai sirkulasi yang didalamnya terdapat bangunan beserta fungsinya. Pola bangunan tidak terlepas dari kepadatan bangunan. Kepadatan bangunan dibedakan menjadi tiga; kepadatan tinggi (BCR diatas 70 %), kepadatan sedang (50 % dibawah BCR dibawah 70 %) dan kepadatan rendah (BCR dibawah 50%), (Tyas, Danial, & Izjrail, 2013).

2.1.2 Permukiman

Menurut undang-undang no.4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, bahwa permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan. Permukiman adalah kawasan yang didominasi oleh lingkungan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja yang terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan, sehingga fungsinya dapat berdaya guna dan berhasil guna. Permukiman ini dapat berupa permukiman perkotaan maupun permukiman pedesaan (Kamus Tata Ruang Tahun 1997) Permukiman adalah tempat atau daerah untuk bertempat tinggal dan menetap (Kamus Tata Ruang, Tahun 1997).

Permukiman sebagai lingkungan binaan manusia, proses dan elemen-elemen penyusunnya tidak lepas dari masalah kondisi sosial budaya masyarakatnya, karena pada hakekatnya wujud fisik lingkungan binaan merupakan manifestasi kehidupan non fisik yang terakumulasi dari waktu ke waktu (Putra, 2006).

Permukiman didalam kamus tata ruang terdiri dari tiga pengertian yaitu:

1. Bagian dari Lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun kawasan pedesaan.
2. Kawasan yang didomisili oleh lingkungan hunian.
3. Tempat atau daerah untuk bertempat tinggal atau tempat untuk menetap.

Menurut Doxiadis dalam Kuswartojo, T, & Salim.S (1997), Permukiman merupakan sebuah sistem yang terdiri dari lima unsur, yaitu; alam, masyarakat, manusia, lindungan dan jaringan. Bagian permukiman yang disebut wadah tersebut merupakan paduan tiga unsur alam (tanah, air, udara) lindungan (shell) dan jaringan (networks), sedang isinya adalah manusia dan masyarakat. Alam merupakan unsur dasar dan di alam itulah diciptakan lindungan rumah, gedung, dan lainnya sebagai tempat manusia tinggal serta menjalankan fungsi lainnya. Jaringan seperti misalnya jalan dan jaringan utilitas merupakan unsur yang memfasilitasi hubungan antara sesama maupun antar unsur yang satu dengan yang lain. Secara lebih sederhana dapat dikatakan, bahwa permukiman adalah paduan unsur manusia dengan masyarakatnya, alam dan unsur buatan sebagaimana digambarkan Doxiadis melalui ekistiknya (Kuswartojo, T. & Salim.S,1997).

Penelitian yang menganalisa aspek pola pergerakan terhadap morfologi permukiman tepian air dilakukan oleh Darjosanjoto (2007) dalam penelitiannya yang berjudul *Permeability Maps of Residential Settlements Within The Coastal Area of Surabaya, Indonesia*. Penelitian ini menganalisa elemen morfologi yaitu ruang terbuka, pola jalan dan bentuk permukiman dalam hubungannya dengan pergerakan ruang. Penelitian ini mendeskripsikan hubungan yang kuat antara pengaruh sosial terhadap ruang dan pergerakan (sirkulasi). Disamping itu, faktor lingkungan mempunyai peranan penting terhadap pola jalan, ruang terbuka dan orientasi bangunan sehingga mempengaruhi tata letak permukiman dan bentuk permukiman nelayan.

Untuk menjawab sebagian isu perkembangan permukiman dan pendekatan terkini penyelenggaraan permukiman (Frick H,2006) menegaskan bahwa rumah tinggal bukan hanya sebuah bangunan dalam arti fisik, melainkan juga tempat kediaman yang memenuhi syarat-syarat kehidupan yang layak, dipandang dari berbagai segi kehidupan masyarakat. Secara garis besar, rumah memiliki empat fungsi pokok sebagian tempat tinggal yang layak dan sehat bagi setiap manusia, yaitu: (*American Public Health association, Basic Principle of Healthful Housing, New York 1960*. Dikutip dari Heinz; 2006).

1. Rumah harus memenuhi kebutuhan pokok jasmani manusia
 - a. Dapat memberi perlindungan terhadap gangguan-gangguan cuaca atau keadaan iklim yang kurang sesuai dengan kondisi hidup manusia, misalnya panas, dingin, angin hujan, dan udara yang lembab.
 - b. Dapat memenuhi kebutuhan penghuninya untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan rumah tangga sehari-hari, antara lain: kegiatan kerja yang ringan misalnya menjahit, memasak, belajar, dan menulis serta kegiatan rutin untuk memenuhi kesehatan jasmani bagi kelangsungan hidup yakni antara lain: mandi, makan, minum, tidur serta yang tenang di waktu lelah atau sakit.
2. Rumah harus memenuhi kebutuhan pokok rohani manusia. rumah yang memberi perasaan aman dan tenteram bagi seluruh keluarga sehingga mereka dapat betah berkumpul dan hidup bersama, dan dapat mengembangkan karakter kepribadian yang sehat.
3. Rumah harus melindungi manusia dari penularan penyakit. rumah yang dapat menjauhkan segala gangguan kesehatan bagi penghuninya.
4. Rumah harus melindungi manusia dari gangguan luar. rumah harus kuat dan stabil sehingga dapat memberi perlindungan terhadap gangguan keamanan yang disebabkan bencana alam, kerusuhan atau perampokan.

Permukiman berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal hunian atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan, sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan prasarana, sarana lingkungan dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan serta sebagai tempat untuk menetap.

Konsep permukiman menurut (Daxiadis dalam Soedarsono, 1986), yaitu: Permukiman adalah penataan kawasan yang dibuat oleh manusia yang tujuannya adalah untuk berusaha hidup secara lebih mudah dan lebih baik terutama pada masa kanak-kanak member rasa bahagia dan rasa aman (seperti diisyaratkan oleh Aristoteles). Permukiman menurut Vinch, VC dan Trewartha, GT dalam Bintarto, R (1977), menyatakan permukiman tempat kediaman penduduk adalah suatu tempat atau daerah dimana penduduk berkumpul dan hidup bersama, dimana mereka membangun rumah-rumah, jalan guna kepentingan mereka.

Dalam Undang-undang RI No. 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman yang dimaksud dengan:

- a. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai hunian atau sarana pembinaan keluarga,
- b. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana sarana lingkungan.

2.1.3 Elemen-elemen Morfologi

Menurut Hillier dan Hanson (1984) bahwa morfologi terdiri dari dua komponen dasar, yakni ruang untuk sistem jalan dimana masyarakat melakukan berbagai pergerakan dan aktivitasnya, dan ruang untuk berbagai bangunan dengan berbagai fungsinya. Yang pertama menciptakan sistem kepadatan, dimana ruang didefinisikan oleh bangunan dan pintu masuk. Sistem yang kedua dimana ruang mengelilingi bangunan dengan beberapa pintu masuk. Oleh karena itu menurut Hillier dan Hanson (1984) bahwa elemen-elemen yang mempengaruhi morfologi terdiri dari bangunan, ruang terbuka dan pola jalan. Elemen-elemen tersebut mempunyai hubungan yang kuat terhadap pengaruh sosial dan konfigurasi ruang.

Sirvani (1985:7) mengatakan bahwa elemen-elemen pembentuk kota terdiri dari 8 elemen, meliputi (1) penggunaan lahan (land use), (2) bentuk dan massa bangunan (building form and massing), (3) sirkulasi dan parkir (circulation and parking), (4) ruang terbuka (open space), (5) jalur pedestrian (pedestrian way), (6) dukungan aktivitas (activity support), (7) tata informasi (Signage), dan (8) preservasi (preservation). Kedelapan elemen-elemen pembentuk kota ini dipengaruhi oleh fisik lingkungan, aktivitas sosial dan budaya masyarakat.

Whitehand (2005:20) menjelaskan bahwa pola jalan, bentuk bangunan dan tata guna lahan merupakan unsur yang mempengaruhi bentuk dan perkembangan kota. Karakteristik jaringan jalan merupakan zona pembatas, bentuk bangunan merupakan histori dan ciri khas suatu

kawasan, sedangkan tata letak bangunan dan fasilitas umum merupakan ciri khas dari tata guna lahan. Selanjutnya Whitehand (2005) menjelaskan bahwa ketiga unsur tersebut dipengaruhi oleh kondisi geografis topografi dan budaya setempat yang berkembang dari waktu ke waktu sejalan dengan perkembangan kota. Dengan memahami kompleksitas fisik kota berupa bangunan, tata guna lahan dan pola jalan yang membentuk struktur kota, maka akan membantu kita untuk memahami cara-cara dimana kota telah tumbuh dan berkembang.

Sima dan Zhang (2007:103) menjelaskan bahwa morfologi menyangkut bagian dari kota yang berhubungan dengan sistem jalan, plot kapling dan plot bangunan yang akan berubah sejalan dengan proses evolusi kota. Elemen-elemen tersebut menonjolkan pengaturan tata letak dalam membentuk struktur fisik kota. Selanjutnya Sima dan Zhang (2007) menjelaskan bahwa aspek geografi merupakan aspek yang mengatur sistem struktur dan struktur dari elemen-elemen tersebut sehingga membentuk susunan jaringan perkotaan dan membentuk tipologi suatu kota. Kota tidak hanya terbentuk dari tata guna lahan, pola jalan, perletakan bangunan dan ruang terbuka dalam dua dimensi saja, tetapi garis langit juga merupakan elemen pembentuk kota.

Menurut Heryanto (2011:18) mengatakan bahwa elemen-elemen pembentuk kota meliputi 1) bentuk bangunan (building form), 2) pola jalan (street pattern), 3) tata-guna tanah (land use), 4) ruang terbuka (open space), dan 5) garis langit (skyline). Selanjutnya Heryanto mengatakan bahwa kelima unsur determinan utama yang membentuk karakter bentuk

fisik kota dikondisikan oleh kekuatan budaya, politik, sosial dan ekonomi masyarakat dan ditunjang oleh keadaan sekelilingnya.

Namun pada penelitian kali ini akan dibahas empat (4) elemen morfologi 1) bentuk bangunan (building form), 2) pola jalan (street pattern), 3) tata-guna tanah (land use), 4) ruang terbuka (open space), 5) fungsi bangunan (building function). Berdasarkan pembahasan tentang morfologi dari berbagai terminologi, maka elemen-elemen morfologi pembentuk kota dijelaskan dalam tabel 2.1.

Tabel 1. Elemen-elemen Morfologi

No.	Menurut	Elemen-Elemen Morfologi				
		Pola Tata Guna Lahan	Bentuk Bangunan	Pola Jalan	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Fungsi Bangunan
1.	Hillier dan Hanson (1984)	-	ada	ada	ada	ada
2.	Sirvani (1985)	Ada	ada	ada	ada	ada
3.	Whitehand (2005)	ada	ada	ada	-	ada
4.	Sima dan Zhang (2007)	ada	ada	ada	ada	ada
5.	Heryanto (2011)	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber: Hillier dan Hanson, Sirvani, Whitehand, Sima dan Zhang, Heryanto. (Edward Syarif, 2016 & Peneliti, 2021)

Berdasarkan tabel 1. maka dapat disimpulkan bahwa secara umum morfologi pembentuk kota dan permukiman terdiri atas 4 elemen yaitu;

1. Tata guna lahan (*land use*) merupakan pengaturan penggunaan lahan untuk menentukan pilihan dalam mengalokasikan fungsi tertentu, sehingga dapat memberikan gambaran keseluruhan bagaimana

daerah-daerah pada suatu kawasan seharusnya berfungsi. Tata guna tanah dapat dijadikan dasar untuk membangun kembali dan merencanakan fungsi baru dari suatu kawasan. Land Use dapat menciptakan hubungan antara sirkulasi, pola jalan, pengaturan lot-lot bangunan serta mengatur kepadatan bangunan dan penggunaan lahan. Land uses juga bisa dijadikan dasar untuk revitalisasi suatu bangunan.

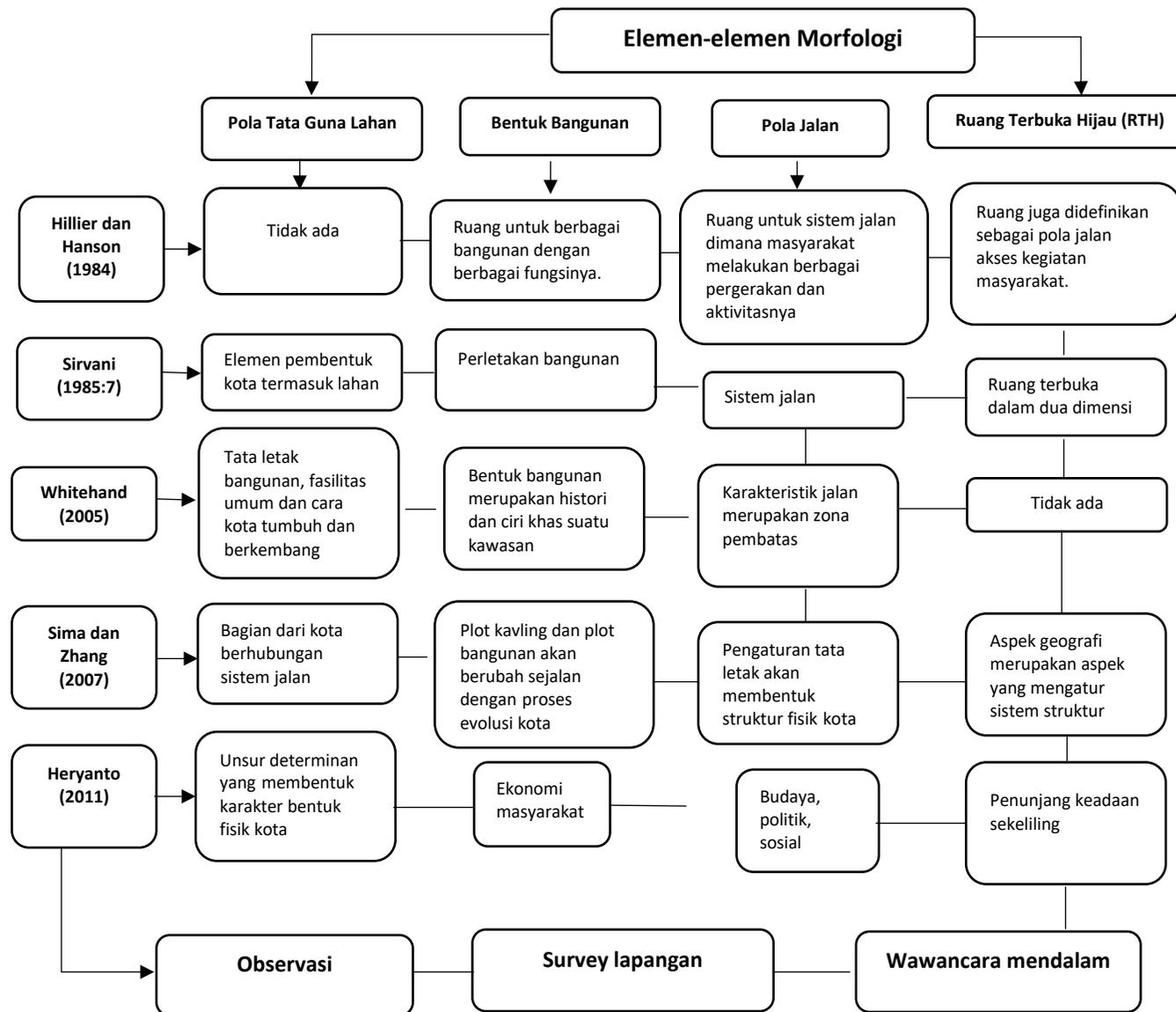
2. Pola jalan (*street pattern*) Pola jalan adalah salah satu elemen pembentuk pola blok kawasan kota yang secara langsung dapat mengontrol pola kegiatan kota. Jalan adalah ruang yang terletak diantara blok-blok kawasan kota atau lorong-lorong ruang publik yang membuat suatu jaringan. Pola jaringan jalan terbentuk melalui suatu proses dan merupakan bagian atau kelanjutan pola yang ada sebelumnya. Jalan merupakan salah satu alat yang paling kuat menstrukturkan lingkungan perkotaan, karena dapat membentuk, mengarahkan dan mengendalikan pola aktivitas dalam suatu kota. Selain itu pola jalan dapat membentuk karakter suatu kawasan dan kota.
3. Bentuk bangunan (*building form*). Bangunan mempunyai peranan penting dalam membentuk struktur jaringan jalan dan area publik. Bangunan akan membentuk petak-petak massa (pola tunggal dan blok) serta ruang terbuka. Massa bangunan pada permukiman biasanya saling berhubungan satu dengan lainnya dan membentuk blok bangunan yang dibatasi oleh jalan-jalan yang merupakan penghubung

antara bangunan. Pada penataan suatu kota, bentuk bangunan dan hubungan antar massa seperti ketinggian bangunan, jarak bangunan, gaya dan fasad bangunan harus diperhatikan sehingga ruang yang terbentuk menjadi teratur. Selain itu bentuk bangunan yang ada pada suatu kawasan dapat menjadi karakter suatu kota.

4. Ruang terbuka (*open space*). Ruang terbuka merupakan unsur yang memberikan karakter bentuk kota karena ruang terbuka merupakan ruang dimana kehidupan bermasyarakat berlangsung. Ruang terbuka kota terdiri dari ruang publik seperti plaza, lapangan olahraga, taman dan jalur hijau.
5. Fungsi bangunan (*building function*). Fungsi bangunan merupakan unsur yang dipengaruhi oleh faktor alam berupa kontur tanah menyebabkan pola permukiman yang berkelompok. Faktor demografi berupa jumlah penduduk juga berakibat pada jumlah dan kepadatan masa bangunan. Faktor budaya waris mengakibatkan pola permukiman yang berkembang ke arah belakang. Selain itu, faktor pariwisata membuat adanya perubahan tata masa bangunan dan peruntukan bangunan, dari semula hanya hunian, kini berubah menjadi homestay maupun warung. Di area yang dianggap suci sekalipun, kini dibangun fasilitas wisata berupa spot foto dan berdiri beberapa warung milik warga. Kebijakan pemerintah juga turut andil dalam perubahan morfologi dalam hal penambahan jalur sirkulasi berupa jalan lokal primer ataupun sekunder baru menuju ke permukiman. Selanjutnya,

jalan tersebut juga memicu berdirinya tempat-tempat usaha milik masyarakat di bidang pertokoan yang semakin banyak.

Kelima elemen ini menjadi elemen utama yang membentuk karakteristik fisik suatu kota. Sedangkan pada morfologi permukiman, elemen tata guna lahan berfokus pada plot kapling dalam permukiman. Perubahan dan perkembangan keempat elemen ini dipengaruhi oleh aspek fisik lingkungan dan aspek non fisik yang meliputi budaya, sosial, politik dan ekonomi (Edward Syarif,2016), sedangkan untuk elemen fungsi bangunan sebagai tambahan temuan penelitian yang diperoleh selama melaksanakan penelitian. Berikut konsep teoritik berdasarkan teori dari beberapa peneliti terdahulu adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Kerangka Teoritik

2.1.4 Faktor-faktor Pendorong Morfologi Permukiman

Dalam kaitannya dengan persebaran penduduk dengan tumbuhnya perumahan dan permukiman baik di perkotaan maupun di perdesaan yang relatif datar akan membentuk pola-pola tersendiri yang secara keseluruhan dipengaruhi oleh posisinya secara geografis dan karakteristik tempatnya (Branch dalam Yoelianto, 2005). Hal ini mencerminkan bahwa kondisi topografi yang relatif datar di wilayah penelitian merupakan modal dasar dari pertumbuhan perumahan dan permukiman. Selanjutnya hal-hal yang harus diperhatikan dalam perkembangan perumahan adalah pewilayahan (zoning); utilitas (utilities); faktor-faktor teknis (technical factors); lokasi (locations); estetika (aesthetics); komunitas (community); pelayanan kota (city services); dan biaya(costs), (Snyder, JC; Catanese, AJ,1985).

Secara umum, lingkungan perumahan dan permukiman tidak terlepas dari dukungan ketersediaan prasarana dan sarana lingkungan. Sistem prasarana dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas fisik atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk menunjang sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg, Neil, 1987). Menurut Undang-Undang Perumahan dan Permukiman. Tahun 1992, bahwa sarana lingkungan merupakan fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya.

Dalam kaitan ini, kriteria penentuan baku kelengkapan pendukung prasarana dan sarana lingkungan dalam perencanaan kawasan perumahan kota sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 378/KPTS/1987 menyebutkan bahwa untuk menghasilkan suatu lingkungan perumahan yang fungsional sekurang-kurangnya bagi masyarakat penghuni, harus terdiri dari kelompok rumah-rumah, prasarana lingkungan dan sarana lingkungan. Dewasa ini, potensi pengembangan kota lebih dipengaruhi oleh daya tarik kota akibat adanya akumulasi kegiatan usaha perekonomian bidang industri dan jasa pelayanan. Perkembangan kota-kota besar maupun kecil seringkali bertambah luas bersamaan kegiatan industri dan jasa tersebut menjadikan kota sebagai pasar tenaga kerja yang memberikan keuntungan aglomerasi dan menyebabkan tingkat produktifitas dan efisiensi yang tinggi (Richardson dalam Malik, 2003:27).

Pada sisi lain, kemampuan kota menyediakan prasarana dan sarana sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat menjadi bagian penting untuk mempertahankan momentum perkembangan kota. Oleh karenanya, kelangsungan dan kelestarian suatu kota harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Undang-undang R.I Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengartikan bahwa pola pemanfaatan ruang adalah bentuk pemanfaatan ruang yang menggambarkan ukuran, fungsi, serta karakter kegiatan manusia dan atau kegiatan alam.

Wujud pola pemanfaatan ruang diantaranya meliputi pola lokasi, sebaran permukiman, tempat kerja, industri dan pertanian, serta pola penggunaan tanah perdesaan dan perkotaan. Salah satu tujuan dalam penataan ruang adalah tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk:

1. Mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur, dan sejahtera;
2. Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
3. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna, dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
4. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan;
5. Mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

Dalam perkembangan perumahan ada 3 (tiga) faktor yang berpengaruh. Faktor-faktor tersebut antara lain: (1) Kependudukan; (2) Pertanahan; (3) Pembiayaan dan Dana (Peraturan Perundang-undangan Departemen Pekerjaan Umum, 1994). Selama kebijaksanaan tentang lokasi perumahan belum ditegakkan secara mapan. maka perkembangan lokasi perumahan, termasuk sarana dan prasarananya akan cenderung berjalan masing-masing tanpa keterpaduan yang harmonis dengan elemen lainnya. Dengan bermunculannya pengembang yang semakin banyak, telah mendorong perkembangan lokasi-lokasi perumahan baru tumbuh secara acak.

Karyoedi dalam Malik, (2003:6), menguraikan bahwa “kriteria untuk menilai kemampuan suatu kota dapat dilihat dari perspektif potensi yang dimiliki. Letak geografis yang strategis akan sangat mendukung percepatan pembangunan dibanding daerah belakangnya yang terisolir”. Di sisi lain, pengembangan kota sangat tergantung pada kemampuan untuk menciptakan dan menarik sumber daya produktif dari luar yang dibutuhkan oleh pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan suatu kota, yaitu:

- Faktor yang merupakan modal dasar, yaitu lahan kota, sumber dana dan penduduk.
- Faktor penunjang yang merupakan fungsi primer, yaitu kegiatan industri dan jasa komersil yang menjadi daya tarik bagi tenaga kerja.
- Faktor penunjang yang merupakan fungsi sekunder atau faktor pembentuk struktur internal kota berupa lingkungan perumahan, fasilitas pelayanan umum, prasarana kota dan tenaga kerja.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Bab VI Pelaksanaan Penataan Ruang telah mengatur mengenai Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Penataan Kawasan Perkotaan, dan Penataan Kawasan Perdesaan. Hal ini mengartikan bahwa penggunaan lahan guna Pengembangan pembangunan perumahan Permukiman harus berpodoman pada ketentuan-ketentuan Penataan ruang.

Bahwa penggunaan lahan erat kaitannya dengan kesesuaian lahan Kawasan dan berpengaruh langsung terhadap pengelolaan lingkungan dan pengendaliannya. Sistem tata ruang pada dasarnya diciptakan untuk Penataan lingkungan yang baik, serasi, seimbang serta berkesinambungan. Menurut Siahaan (1992:185), bahwa instrument pengendalian dalam hukum lingkungan terdiri dari:

- a) Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal);
- b) Sistem perizinan (lisencing); atau juga dengan
- c) Sistem pemeriksaan (auditing)

Syarif E, (2016) mengemukakan beberapa aspek yang mempengaruhi perubahan morfologi kota adalah aspek pengaruh air, aspek reklamasi, aspek tata guna lahan, aspek perubahan bentuk rumah dan aspek pola pergerakan. Perubahan bentuk morfologi kota dan permukiman tepian air tersebut dipengaruhi oleh aspek fisik yang menyangkut kondisi lingkungan dan aspek non fisik yang menyangkut kondisi sosial, budaya, ekonomi, demografi, urbanisasi, kebijakan dan politik.

Selain itu, faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial dari dalam masyarakat, antara lain sebagai berikut:

1. Bencana alam atau lingkungan fisik terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, angin puting beliung, banjir, dan lain-lain dapat menyebabkan masyarakat yang mendiami wilayah tersebut, terpaksa harus mengungsi dari tempat tinggalnya.

Apabila masyarakat tersebut mendiami tempat tinggalnya yang baru, maka harus menyesuaikan diri dengan keadaan alam yang baru. Bagi masyarakat yang semula hidup berburu kemudian menetap di suatu daerah pertanian, akan melahirkan perubahan pada diri masyarakat, misalnya muncul kelembagaan masyarakat yang baru yaitu pertanian. Sebab yang bersumber pada lingkungan alam fisik terkadang ditimbulkan oleh tindakan masyarakat itu sendiri. misalnya penggunaan tanah secara sembrono tanpa memperhatikan kelestarian tanah, penebangan hutan secara masif tanpa reboisasi, dan sebagainya.

2. Peperangan dengan negara lain dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial karena biasanya negara yang menang akan memaksakan kebudayaannya pada negara yang kalah.
3. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain apabila sebab-sebab perubahan bersumber pada masyarakat lain, itu mungkin terjadi karena kebudayaan dari masyarakat lain melancarkan pengaruhnya.

Hubungan yang di lakukan secara fisik antara dua masyarakat mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan pengaruh timbal balik. Namun apabila hubungan tersebut berjalan melalui alat-alat komunikasi, ada kemungkinan pengaruh itu datang dari satu pihak saja. Di dalam pertemuan dua kebudayaan tidak selalu terjadi proses saling mempengaruhi. Kadang kala pertemuan dua kebudayaan yang seimbang akan saling menolak.

Apabila salah satu dari dua kebudayaan yang bertemu memiliki taraf teknologi yang lebih tinggi, maka akan terjadi proses imitasi, yaitu peniruan terhadap unsur-unsur kebudayaan lain. Unsur-unsur kebudayaan asli yang diubah dan perlahan akan digantikan oleh kebudayaan asing tersebut (Soekanto, 2015).

Indonesia mengalami perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu, hal ini tentu berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Salah satu aspek yang dapat menunjang keberlangsungan kehidupan dalam masyarakat adalah kebutuhan akan sarana transportasi, yang berfungsi sebagai pembentuk dan pemicu pertumbuhan suatu wilayah. Hal ini terlihat dari sejauh mana intensitas mobilitas penduduk yang pesat serta aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Aktivitas tersebut dapat meningkat jika suatu wilayah didukung oleh sarana transportasi yang lengkap dan saling terintegrasi baik jalur darat, laut, maupun udara. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dalam percepatan pembangunan moda transportasi nasional untuk memajukan kehidupan masyarakat, baik secara sosial dan ekonomi. Moda transportasi dapat menjadi unsur pendorong yang berfungsi menyediakan jasa transportasi yang efektif dan mampu menjangkau daerah terisolasi dan terpencil (Sihaloho & Jinca, 2012).

Pembangunan dibidang ekonomi diarahkan untuk terciptanya sistem kegiatan pembangunan baru, khususnya perdagangan sebagai media sirkulasi aliran barang dan jasa sesuai fungsi dan visi pengelolaan pembangunan Kota Makassar, dengan memperluas sistem jaringan aliran barang dan jasa. Sistem

perkotaan akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan sistem komunikasi dan transportasi dan mengatur tata niaga untuk menjaga persaingan tidak sehat yang dapat merugikan masyarakat. (Materi penyusunan rencana pengembangan Kawasan permukiman prioritas, 2009).

2.1.5 Teori Pangkalan

1. Pengertian Pangkalan

Arti kata dari pangkalan. Definisi dari pangkalan. Pengertian dari pangkalan: 1) **tempat kapal atau perahu berlabuh**; tepi laut (atau tepi sungai) tempat berlabuh; 2) tempat menimbun (mengumpulkan) barang-barang dagangan, hasil bumi, dsb; 3) tempat (pelabuhan, lapangan terbang, dsb) yang dijadikan tumpuan untuk menyerang musuh; 4) tempat tertentu untuk berkedai, perhentian taksi, dan sebagainya; 5) tuan atau nyonya rumah (penerima tamu). (Kamus KBBI, 2008).

Definisi dari **pangkalan**: **1)** tempat perahu dll berhenti (berlabuh); **2)** tempat barang-barang dagangan dll dikumpul (untuk diangkut dll); **3)** pelabuhan (lapangan terbang dll) yg menjadi tempat untuk mengadakan latihan, melancarkan serangan dsb: *dua ribu kapal terbang menyerbu ~ roket ini dan meranapkan landasannya*; ~ *armada pangkalan kapal-kapal perang*; **4).** Jika tempat tertentu untuk berkedai, perhentian taksi, dsb; ~ *data* simpanan sejumlah besar data dlm bentuk yg dapat dikendalikan oleh komputer; ~ *tentera udara (laut)* pangkalan tempat operasi tentera udara (laut); *si* ~ Mn tuan rumah (penerima tetamu); Malaysia (Dewan).

2. Pengertian Pangkalan Angkatan Laut

Pangkalan Utama Angkatan Laut (sering disingkat **Lantamal**) adalah pangkalan militer TNI Angkatan Laut yang berada di bawah Komando Armada Republik Indonesia (*Koarmada RI*). Lantamal dipimpin oleh seorang Komandan Pangkalan Utama TNI AL yang biasa disebut Danlantamal dengan pangkat Laksamana Pertama TNI/Brigadir Jenderal TNI Marinir.

Tujuan utama Pangkalan Angkatan Laut secara umum adalah untuk menyediakan tempat berlindung, perbaikan dan pasokan untuk kapal dan istirahat serta rekreasi bagi para anak buah kapal, untuk bertindak sebagai fokus kekuatan sedekat mungkin dengan musuh potensial, untuk menjadi bagian dari layar, untuk memperingatkan terhadap serangan musuh, dan untuk memastikan kontrol pengiriman sendiri. (Hotma Untung Sinaga, "Analisis Kemampuan Pangkalan TNI AL Tarakan dalam Menghadapi Potensi Konflik di Laut Sulawesi (Blok Ambalat)", (Jakarta, Seskoal, 2015:17).

Peran Pangkalan TNI AL harus mampu mendukung operasi laut yang diselenggarakan oleh TNI AL maupun TNI tidak akan dapat berjalan optimal tanpa diimbangi oleh pemenuhan aspek dukungan yang memadai. Karena itu untuk menempatkan kedudukan Pangkalan secara proporsional, maka tugas dan fungsi pangkalan sebagai tempat pemangkalan, pembekalan, penyelenggaraan dan pemeliharaan serta perbaikan unsur-unsur operasional TNI AL dan perawatan personil harus mampu mendukung dengan baik.

Kemampuan dukungan ini biasa dikenal dengan fungsi “5R” yaitu Rebase, Replenishment, Repair, Rest and Recreation harus terus ditingkatkan kemampuannya,” ujarnya. Pangkalan TNI AL yang ideal seharusnya mampu menyediakan “5R” tersebut agar operasional Unsur atau KRI tidak terganggu. (Manahan Budiarto Pandjaitan, 2019).

Bagi negara Indonesia yang sebagian wilayahnya berupa perairan, Angkatan Laut memiliki peran penting, secara universal TNI Angkatan Laut memiliki tiga peran yaitu peran militer, polisionil serta peran diplomasi. Peran TNI AL dalam Mendukung Terwujudnya Indonesia Sebagai diplomasi. Secara yuridis yang formal ketiga peran tersebut telah diimplementasikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas TNI Angkatan Laut sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang No.34 Tahun 2004. Oleh karena itu tugas TNI Angkatan Laut dalam rangka menegakkan kedaulatan dan hukum diwilayah laut Indonesia sudah cukup. Meskipun pemerintah telah melakukan legalisasi kebijakan Poros Maritim Dunia dalam rangka pengamanan wilayah laut serta memperkuat pertahanan laut sulit untuk diterjemahkan secara operasional dan taktis walaupun sudah ada doktrin TNI Angkatan Laut.

Legalisasi kebijakan Poros Maritim Dunia atau tidak peran TNI AL sudah jelas, akan tetapi signifikansi peran tersebut belum terlihat. walaupun dalam upaya pengamanan dan penegakkan hukum di wilayah perairan Indonesia seluruh instansi terkait yang berwenang termasuk TNI Angkatan Laut, memiliki tanggung jawaban untuk melaksanakan tugasnya dan menanggulangi

pelanggaran di wilayah perairan Indonesia, tidak terlepas dari berbagai faktor hambatan yang dihadapi oleh TNI Angkatan Laut dalam mendukung terwujudnya Poros Maritim Dunia. Sebagaimana yang dijelaskan di pembahasan peraturan dapat menimbulkan faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi peran TNI AL dalam mendukung terwujudnya Poros Maritim Dunia.

Perbedaan penafsiran dalam pengelolaan hukum diantara instansi yang berwenang, dimana pengaturan kewenangan sudah jelas. Akan tetapi mencerminkan kurangnya koordinasi antar instansi terkait sehingga proses pelaksanaan tugas untuk mendukung kebijakan Poros Maritim Dunia tergantung kepada ego sektoral masing masing instansi sehingga dibutuhkan strategi keamanan maritim dan strategi militer nasional yang sinergis dengan kebijakan Poros Maritim Dunia agar mencapai pilar pengembangan keamanan dan pertahanan maritim. Selain itu Jumlah kapal yang dimiliki TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan pengawasan di laut tidak sebanding dengan wilayah perairan Indonesia. (Yusra Muhammad Haras, 2017).

Pangkalan sebagai bagian dari komponen Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT), harus dapat melaksanakan fungsinya untuk memberikan logistik secara optimal terhadap kelancaran operasional komponen SSAT lainnya, baik kapal, pesawat udara maupun Marinir. Bentuk dukungan yang dimaksud berupa fasilitas labuh baik laut maupun udara, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan, fasilitas pembekalan, fasilitas perawatan personel dan fasilitas pembinaan pangkalan.

Luasnya wilayah yurisdiksi nasional dengan konstelasi geografi sebagai negara kepulauan terbesar di dunia sangat membutuhkan gelar pangkalan yang efektif dan efisien yang dihadapkan pada ancaman perkembangan lingkungan strategis. Oleh karena itu dibutuhkan standarisasi pangkalan secara proporsional.

3. Standar Bangunan Militer

Standar persyaratan teknis pangkalan dalam keputusan standarisasi pangkalan ini merupakan syarat-syarat yang diinginkan, sedangkan dalam mewujudkannya sangat tergantung kepada kebijakan lebih lanjut dengan memperhatikan lokasi, kondisi, situasi pangkalan sesuai kelasnya, serta prioritas yang didasari atas kemampuan anggaran yang tersedia. Guna terwujudnya kesinambungan pembangunan serta keseragaman pangkalan sesuai jenis dan kelasnya dikaitkan dengan perkembangan situasi dan kondisi kemampuan finansial pemerintah, efektivitas dukungan operasi, perkembangan lingkungan strategis serta kebijakan Angkatan Laut ke depan, maka perlu disusun kembali buku petunjuk Standarisasi Pangkalan TNI Angkatan Laut sebagai Surat Keputusan Kasal Nomor Skep/372/III/2007 tanggal 14 Maret 2007 tentang Standardisasi Pangkalan TNI Angkatan Laut. (Standarisasi Pangkalan TNI Angkatan Laut (PUM-7.03), Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Kep/1771/XII/2013).

Dalam hal standar bangunan militer umumnya dan bangunan TNI Angkatan Laut khususnya untuk bangunan gedung negara seperti rumah dinas sudah diatur dalam standarisasi pangkalan TNI Angkatan Laut (PUM-7.03),

Untuk mendukung syarat-syarat operasional suatu pangkalan, maka Pangkalan TNI Angkatan Laut harus mempunyai syarat-syarat teknis yang harus dipenuhi. Untuk permukiman atau Rumah Negara/Rumah Dinas didalam Kedinasan Pangkalan Utama Angkatan Laut VI termasuk pada bagian fasilitas perawatan personel. Adapun Fasilitas Perawatan Personel yang telah diatur dalam standarisasi Pangkalan adalah sebagai berikut:

1) Tempat Tinggal.

a) Rumah Negara.

(1) Perwira Pertama.

(a) Luas: 45 m².

(b) Jumlah: 17 unit.

(c) Konstruksi: permanen, batu bata.

(d) Tipe: rumah tunggal.

(2) Bintara/Tamtama.

(a) Luas: 36 m².

(b) Jumlah: 60 unit.

(c) Konstruksi: permanen, batu bata.

(d) Tipe: kopel/2 rumah gandeng (bintara); Blok/4 rumah gandeng (tamtama).

(3) Pegawai Negeri Sipil/Karyawan menyesuaikan.

b) Mess.

(1) Perwira Menengah

(a) Luas: 200 m².

- (b) Kapasitas: sepuluh orang.
 - (c) Jumlah: satu buah.
 - (d) Konstruksi: permanen, batu bata, satu lantai
- (2) Perwira Pertama.
- (a) Luas: 350 m².
 - (b) Kapasitas: sepuluh orang.
 - (c) Jumlah: satu buah.
 - (d) Konstruksi: permanen, batu bata, satu lantai.
- (3) Bintara dan Tamtama.
- (a) Luas: 1.250 m².
 - (b) Kapasitas: seratus orang.
 - (c) Jumlah: satu buah.
 - (d) Konstruksi: permanen, batu bata, dua lantai,
- 2) Kesehatan. Rumkital Tingkat IV (kapasitas 50 tempat tidur).
- 3) Olahraga dan rekreasi:
- a) Gedung Olahraga.
 - (1) Kapasitas: standar basket ball (ukuran 45 m x 35 m).
 - (2) Jumlah: satu buah.
 - (3) Konstruksi: permanen.
 - (4) Tipe: satu sisi untuk tribun penonton.
 - b) Lapangan Olahraga.
 - (1) Stadion
 - (a) Fasilitas: sepak bola dilengkapi fasilitas atletik/jogging track

(b) Dimensi:

1) Lapangan dan jogging track: LB 19.950 m² dan LT 99.750 m²

2) Tanpa Tribun.

(c) Jumlah: satu buah.

(d) Konstruksi: permanen.

(e) Tipe: tanpa dilengkapi tribun

(2) Lapangan Tenis.

(a) Kapasitas: dua band.

(b) Jumlah: satu buah.

(c) Konstruksi: *hard Court*.

(3) Lapangan bola volley: dua buah.

c) Gedung Serbaguna/Kesenian.

(1) Kapasitas: 200 orang

(2) Jumlah: satu buah.

(3) Konstruksi: permanen, ukuran 400 m²

d) Lapangan volley sesuai kebutuhan.

e) Sarana olahraga perairan.

4) Sarana Ibadah Sesuai Situasi dan Kondisi Daerah Setempat.

5) Latihan.

a) Ruang Kelas/Belajar/Sekolah.

(1) Kapasitas: 20 orang (ukuran 7 m x 7 m).

(2) Jumlah: dua buah.

b) Ruang Praktikum.

(1) Kapasitas: 10 orang (ukuran 7 m x 7 m).

(2) Jumlah: satu buah.

c) Ruang Perpustakaan.

(1) Kapasitas: 10 orang (ukuran 7 m x 7 m).

(2) Jumlah: satu buah.

d) Lapangan Tembak.

(1) Kapasitas: 10 lajur (ukuran 330 m x 30 m).

(2) Jumlah: satu buah.

(3) Tipe: dapat digunakan untuk berbagai senjata ringan dengan mengubah posisi sasaran. (Standarisasi Pangkalan TNI Angkatan Laut.PUM -7.03, 2013).

2.2.4 Motto Jalesveva Jayamahe

Jalesveva Jayamahe adalah doktrin dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL). Semboyan ini berasal dari bahas Sanskerta, yang secara harfiah dituliskan dengan "Jalesveva Jayamahe". Jalesveva Jayamahe terdiri dari tiga bagian yaitu jalesu, eva, dan jayamahe."Jalesu" berasal dari akar kata Jala yang berarti "Air/Laut". Kemudian arti kata Eva = Justru = Bahkan = Tanpa Kecuali. "Eva" adalah kata sambung yang berarti "Bahkan". Sedangkan Jayamahe berasal dari akar kata "Ji" yang berarti "Menang". Jayamahe adalah perubahan bentuk bagi orang pertama jamak, yang diartikan "Kami Menang". Sehingga secara keseluruhan, Jalesveva Jayamahe berarti "Justru di Lautan Kita Menang" atau "Kejayaan Kita ada DiLaut".

Hakikat doktrin Jalesveva Jayamahe adalah suatu pedoman untuk menuju TNI AL yang jaya atau menang dilautan. (Buku Doktrin TNI AL). Motto atau seruan TNI Angkatan Laut Indonesia adalah "Jalesveva Jayamahe" yang sering kali diterjemahkan sebagai "Justru di Laut Kita Jaya". Motto ini sebenarnya berasal dari zaman Majapahit, yang Angkatan Lautnya sering memakai kata ini untuk membangkitkan semangat. Sebenarnya, ungkapan ini berasal dari Bahasa Sansekerta *Jaleṣeva Jayamahe* dan bisa dianalisis sebagai berikut:

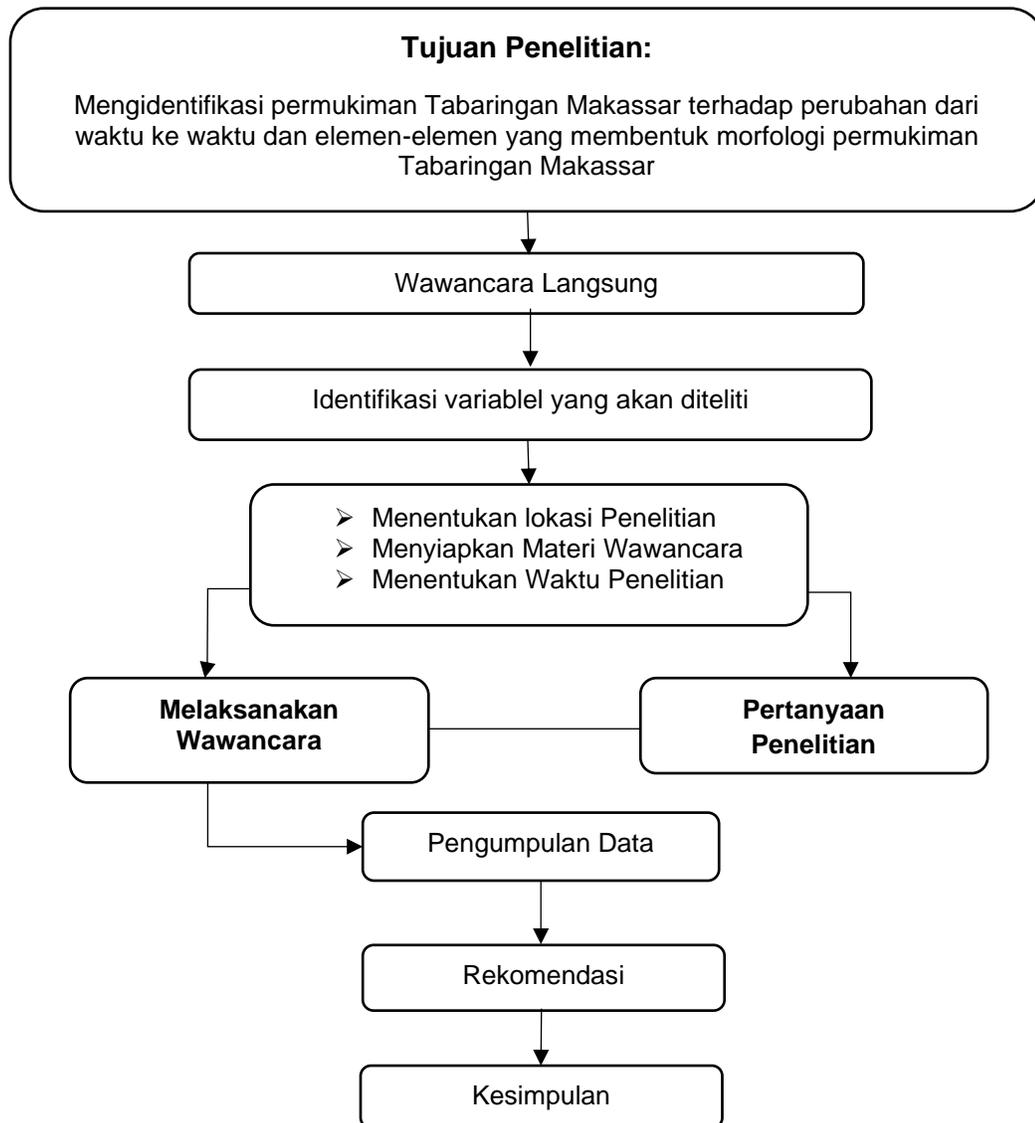
- *Jaleṣeva* yang terdiri dari dua bagian, *jaleṣu* dan *eva*. *Jaleṣu* berasal dari kata dasar *jala* (maskulin) yang berarti air, dan *jaleṣu* adalah bentuk jamak dan lokativus yang secara harfiah bisa diterjemahkan sebagai "di air-air".
- *eva* adalah sebuah partikel dan bisa diterjemahkan dengan kata "-lah". *Jayamahe* berasal dari kata kerja (verba) *ji* yang dikonjugasi menurut kala kini persona ketiga jamak dalam modal indikatif dan secara harfiah bisa diterjemahkan sebagai "kita berjaya". Jadi, kalimat ini secara harfiah artinya adalah "di air-airlah kita berjaya". (Buku Jalesveva Jayamahe).

2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

Hasil penelitian sebelumnya dari Firmansyah (2014) menunjukkan bahwa perkembangan infrastruktur transportasi di pangkalan militer semakin hilang perannya, dan perkembangan bentuk keruangan di sekitar kawasan yang semakin padat termasuk oleh bangkitan kegiatan pembangunan jembatan Suramadu, menyiratkan kekurangpahaman maksud penyusunan awal keruangan pangkalan militer sebagai kawasan strategis-eksklusif yang dapat membahayakan keamanan sekitar.

Morfologi pada suatu kota atau kawasan dapat menggambarkan perubahan pada keterbentukan kota serta Kawasan tersebut. Perubahan tersebut dapat ditinjau dari berbagai aspek diataranya terlihat pada pola ruang, bentuk arsitektur, maupun elemen pembentuk karakter sebuah kota. Selain itu, turut dikaji pula mengenai hal yang menjadi implikasi dari suatu perubahan kota tersenut, diantaranya aktivitas masyarakat yang mencakup aktivitas sosial, budaya, dan ekonomi (Aldiansyah dan Nareswari, 2019).

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi permukiman Tabaringan Makassar terhadap perubahan dari waktu ke waktu dan elelmen-elemen yang membentuk morfologi permukiman Tabaringan dan sekitarnya. mengetahui adanya pengaruh Pangkalan Utama Angkatan Laut VI terhadap morfologi permukiman Tabaringan Makassar seperti tergambar dalam bagan kerangka konseptual penelitian berikut ini:



Gambar 4. Kerangka Konseptual Penelitian

2.4 Penelitian Terdahulu

Untuk memperjelas pembaca dalam memahami keterkaitan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, sehingga penulis membuat tabel sebagai berikut yaitu:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Metode Penelitian	Variabel yang diteliti	Relevansi	Hasil Penelitian
1.	"Penataan Kawasan Pusat Kota Mojokerto untuk Memperkuat Identitas Kota". Patrica Bela Barbara (2016).	Diachronic reading dan typological-morphological analysis.	Tindakan, evaluasi dan sejarah	Pembentukan Kawasan sebagai Identitas Kota.	Rumuskan penataan kawasan pusat Kota Mojokerto untuk memperkuat identitas kota,
2.	"Morfologi Kawasan Permukiman Sekoja Jambi. In Seminar Nasional Pembangunan Wilayah dan Kota Berkelanjutan. (Vol. 1, No. 1)". Aldiansyah, A. A., & Nareswari, A. (2019, August).	Deskriptif Kuantitatif; <i>Diacronic Reading.</i>	Wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.	Mengidentifikasi perkembangan fisik kawasan permukiman Sekoja pada lima periode waktu yang signifikan.	Konsep morfologi kawasan permukiman sekoja berdasarkan ekspresi keruangan morfologi kota berkembang dengan bentuk tidak berpola (Unpatterned Cities).
3.	"Perubahan Morfologi Permukiman Tepi Laut Makassar dalam Transformasi Sosial Masyarakat Mariso (Doctoral dissertation, Institut Teknologi Sepuluh Nopember)". Syarif, E. (2016).	Deskriptif Kuantitatif dan Kualitatif; <i>Diacronic Reading.</i>	Observasi, wawancara, peta, dan literature.	Menguraikan elemen-elemen morfologi sesuai dengan periode perkembangannya.	Morfologi permukiman yang terjadi di tepi laut disebabkan perubahan elemen-elemen morfologi yang sesuai dengan periode perkembangannya.

Lanjutan Tabel 2.

No.	Judul	Metode Penelitian	Variabel yang diteliti	Relevansi	Hasil Penelitian
4.	"Kajian Pola Spasial Pertumbuhan Kawasan Perumahan dan Permukiman di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo" Hamzah F. Rachman, (2010), Tesis	Deskriptif Kualitatif;	Observasi, wawancara	Pola spasial pertumbuhan perumahan dan permukiman.	Kecamatan Limboto memiliki bentuk empat persegi panjang, dari jaringan jalan berpola grid dan bersudut siku sedangkan diwilayah belakang lebih memanjang.
5.	"Pola Spasial Permukiman Kampung 99 Pepohonan di Cinere Depok" Saidatul Mu'awanah (2013), Tesis	Deskriptif Kualitatif;	Observasi, wawancara, dan literatur	Pola spasial permukiman.	Ada 2 faktor yang mempengaruhi yaitu fisik dan non fisik, pengaruh faktor-faktor tersebut berbeda-beda pada setiap elemen pola spasial. Meskipun semua faktor turut andil dalam proses terbentuknya pola spasial, namun ada faktor yang dominan pada masing-masing elemen pola spasialnya (tata letak, sirkulasi, arah hadap, dan hirarki).
6.	"Tatanan Spasial Permukiman Tak terencana Kampung Babakan Ciamis Kota Bandung" Dwi Kustianingrum,(2010), Jurnal.	Deskriptif Kualitatif;	Observasi, wawancara, Space syntax, literatur	Tatanan spasial permukiman tak terencana	Aspek Tatanan Spasial Hasil penelitian interface map ini bersifat sederhana, dengan pola linear dan Aspek Hirarki Ruang Luar Permukiman dilihat dari perhitungan relative depth (kedalaman ruang relatif) berdasarkan hubungan ruang yang tergambar pada Justified Permeability Map keseluruhan unit.

Lanjutan Tabel 2.

No.	Judul	Metode Penelitian	Variabel yang diteliti	Relevansi	Hasil Penelitian
7.	"Peran Pangkalan Tentara Nasional Angkatan Laut Bangka Belitung dalam mendukung Operasi Keamanan Laut di ALKI I" Manahan Budiarto Pandjaitan dkk, (2019), Tesis	Deskriptif Kualitatif; survey, ex post facto, eksperimen.	Tindakan, evaluasi dan sejarah	Peran Pangkalan TNI AL Bangka Belitung.	Mampu mendukung secara penuh bagi unsur yang melaksanakan operasi terutama masalah peran dukungan fasilitas labuh dan peran dukungan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kapal dengan baik di ALKI I.
8.	"Peran Pangkalan TNI Angkatan Laut Cilacap Dalam Pembinaan Potensi Maritim Guna Menghadapi Imigran Gelap" Hari Mulyadi, (2017), Tesis	Deskriptif Kualitatif;	Wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.	Peran Pangkalan TNI AL Cilacap.	Pembinaan Potensi Maritim sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa pesisir dan di susun manajemen potensi maritim dengan Sisrendal Binpotmar yang di dukung dengan implementasi lima kemampuan teritorial telah mampu mencapai sasaran yang ditetapkan.
9.	"Pola Spasial Pangkalan Utama TNI AL dalam mendukung Penegakan Kedaulatan dan Hukum di Perairan Wilayah Republik Indonesia". Bondan Haryono, (2009), Tesis	Deskriptif Kuantitatif;	Observasi, wawancara, dan literature	Pola Spasial Pangkalan Utama TNI AL.	Pola persebaran pangkalan dan KAL memiliki kaitan yang tinggi terhadap tingkat pelanggaran hukum, atau jumlah pangkalan dan KAL yang tinggi terbukti dapat menekan tingkat pelanggaran hukum. Tetapi pola persebaran pangkalan dan KAL memiliki kaitan yang rendah terhadap tingkat pelanggaran kedaulatan, atau jumlah pangkalan dan KAL yang tinggi tidak dapat mengurangi pelanggaran kedaulatan, pelanggaran kedaulatan lebih cenderung dipengaruhi faktor geografis dan politik.

Adapun beberapa tesis atau jurnal yang dikumpulkan tersebut ditujukan agar penelitian yang dilakukan semakin kokoh, karena isi yang terdapat pada masing-masing penelitian dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi.

2.5 Kebaruan Penelitian

Beberapa hasil pengujian dari para peneliti terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan, dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Perbedaan dan Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Hamzah F. Rachman, (2010), Tesis	"Kajian Pola Spasial Pertumbuhan Kawasan Perumahan dan Permukiman di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo"	Kecamatan Limboto memiliki bentuk empat persegi panjang, dari jaringan jalan berpola grid dan bersudut siku sedangkan diwilayah belakang lebih memanjang.	Menggambarkan pola spasial pertumbuhan perumahan dan permukiman.	<ul style="list-style-type: none"> • Deskriptif Kualitatif; • Metode Penelitian yang digunakan adalah observasi, survey lapangan, wawancara mendalam.
2	Saidatul Mu"awanah (2013), Tesis	"Pola Spasial Permukiman Kampung 99 Pepohonan di Cinere Depok"	Ada 2 faktor yang mempengaruhi yaitu fisik dan non fisik, pengaruh faktor-faktor tersebut berbeda-beda pada setiap elemen pola spasial. Meskipun semua faktor turut andil dalam proses terbentuknya pola spasial, namun ada faktor yang dominan pada masing-masing elemen pola spasialnya (tata letak, sirkulasi, arah hadap, dan hirarki).	Menggambarkan spasial permukiman dengan faktor fisik dan non fisik serta elemen pola spasialnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Deskriptif • Kualitatif; • Metode Penelitian yang digunakan adalah observasi, survey lapangan, wawancara mendalam.

Lanjutan tabel 3.

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Kebaruan Penelitian	Perbedaan	Persamaan
3.	Musbawati A.N. (2022), Tesis	"Pengaruh Pangkalan Utama Angkatan Laut VI Terhadap Morfologi Permukiman Tabaringan Makassar"	<p>Berdasarkan rumusan masalah terkait morfologi permukiman Tabaringan Makassar, pengaruh Pangkalan sangat besar karena keberadaannya sehingga permukiman sekitar ikut berkembang dan rumah dinas Angkatan Laut juga semakin banyak, faktor yang mempengaruhi dari segi transformasi sosial, fisik, dan ekonomi.</p> <p>aspek yang sangat penting lainnya adalah elemen-elemen morfologi yang mengiringi perkembangan permukiman Tabaringan Makassar serta terdapat perubahan mendasar dan fenomenal yaitu perubahan dari waktu ke waktu fungsi bangunan yang dianggap membuat ruang.</p>	Menggambarkan sejarah permukiman Tabaringan Makassar dan sekitarnya dari waktu ke waktu dan perkembangan 3 Kelurahan yang bersinggungan langsung dengan Pangkalan Utama Angkatan Laut berdasarkan elemen-elemen morfologi.	<ul style="list-style-type: none"> • Deskriptif Rasionalistik Kualitatif • Metode Penelitian yang digunakan adalah observasi, survey lapangan, wawancara mendalam. • Mengidentifikasi perubahan permukiman berdasarkan elemen-elemen morfologi